

TESIS

**EVALUASI PROGRAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
(STUDI KASUS : KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH MANGERAMBA
KELURAHAN TAKATIDUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR)**



**MUH. IKHWAN
MPW4514006**

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS BOSOWA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : EVALUASI PROGRAM PENANGANAN KUMUH
PERKOTAAN (Studi Kasus : Kawasan Permukiman
Kumuh Pesisir Mangeramba Kota Polewali Kabupaten
Polewali Mandar)

NAMA MAHASISWA : MUH. IKHWAN BAHAR

NIM : MPW 4514006

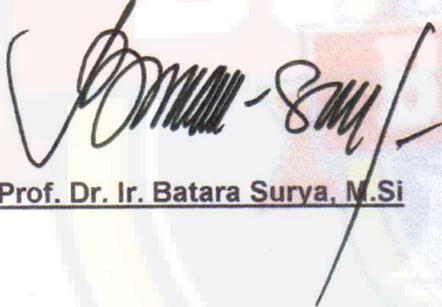
PROGRAM STUDI : Pasca Sarjana Perencanaan Wilayah & Kota

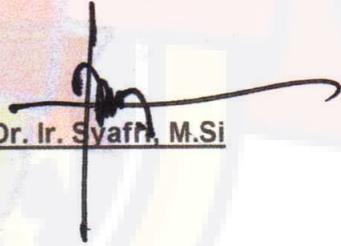
Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si


Dr. Ir. Syafri, M.Si

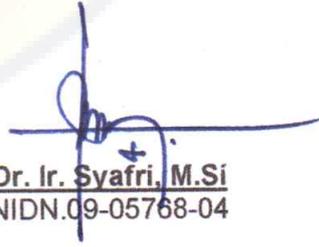
Menyetujui

Direktur

Program Pascasarjana


Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si
NIDN. 09-130171-03

Ketua Program Studi PWK


Dr. Ir. Syafri, M.Si
NIDN.09-05768-04

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Sabtu, 14 September 2019

Tesis Atas Nama : Muh, Ikhwan

NIM : MPW 4514006

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si
(Pembimbing I)

Sekretaris : Dr. Ir. Syafri, M.Si
(Pembimbing II)

Anggota : 1. Dr. Ir. Drs. H. Syahriar Tato, M.Si

2. Dr. Haeruddin Saleh, S.E., M.Si

Makassar, 14 September 2019

Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si
NIDN.09-1301-7400

PERNYATAAN ORISINILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muh. Ikhwan

Nim : MPW 4514006

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Judul Tesis : Evaluasi Program Penanganan Kumuh Perkotaan (Studi Kasus :
Kawasan Permukiman Kumuh Pesisir Mangeramba Kota Polewali
Kabupaten Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar 14 September 2019

Pembuat Pernyataan



MUH. IKHWAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Perencanaan Wilayah dan Kota pada Program Studi Pasca Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bosowa.

Adapun judul tesis ini adalah: " Evaluasi program penanganan permukiman kumuh perkotaan (studi kasus : kawasan permukiman kumuh Mangeramba kelurahan Takatidung kabupaten Polewali Mandar)". Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing : Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si dan Dr. Ir. Syafri, M.Si Dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Orang Tua tercinta yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang dan senantiasa memberi semangat dan dorongan kepada penulis.
2. Kepada Vera Nurhayani Said yang Penulis sayangi, atas kesabaran dan pengertiannya serta memberikan Doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis.

3. Dr. Ir. Drs. H. Syahriar Tato, M.Si dan Dr. Haeruddin Saleh, S.E., M.Si sebagai tim penguji , atas masukkan serta memberikan Doa dan semangat kepada penulis dalam penulisan Tesis ini.
4. Kepada seluruh Rekan-rekan staf Program pascasarjana Universitas Bosowa Makassar,
5. Rekan-rekan kerja saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Makassar, 15 September 2019

Penulis

MUH IKHWAN

ABSTRAK

IKHWAN, *Evaluasi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan (Studi Kasus : Kawasan Permukiman Kumuh Mangeramba Kelurahan Takatidung Kabupaten Polewali Mandar)*. (Dibimbing oleh Batara Surya dan Syafri).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seperti apa pola penanganan kumuh di kawasan Mangeramba, dan menganalisis efektifitas program penanganan kumuh yang telah dilakukan di kawasan Mangeramba baik itu penanganan yang bersumber dari pemerintah, program nasional ataupun CSR

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang membahas mengenai apa yang telah dilakukan terhadap kawasan kumuh dan seperti apa efektifitasnya dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data dari kondisi faktual di lokasi penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan metode skoring

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program penanganan kumuh di kawasan mangeramba memberikan pengaruh terhadap kondisi kekumuhan di Mangeramba, khususnya di indikator jalan lingkungan, drainase lingkungan, Air Minum, Sanitasi, Persampahan dan Kelayakan Bangunan. melalui pelaksanaan Program penanganan kawasan kumuh juga memberikan dampak kepuasan masyarakat setelah adanya penanganan kumuh di Kawasan Mangeramba.

Kata kunci : penanganan kumuh, efektifitas.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Penerimaan	iii
Pernyataan Orisinilan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vi
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Lingkup Penelitian	4
F. Sistematika Pembahasan	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Permukiman Kumuh	7
B. Teori Evaluasi	13
C. Konsep Efektivitas	23
D. Program Penanganan Kumuh	26
E. Konstruksi Teori	33
F. Peneliti Terdahulu	35
G. Kerangka Pikir	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	39
C. Jenis Dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Populasi dan Sampel	47

F. Teknik Analisis Data	48
G. Variabel Penelitian	53
H. Defenisi Operasional Dalam Penelitian	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

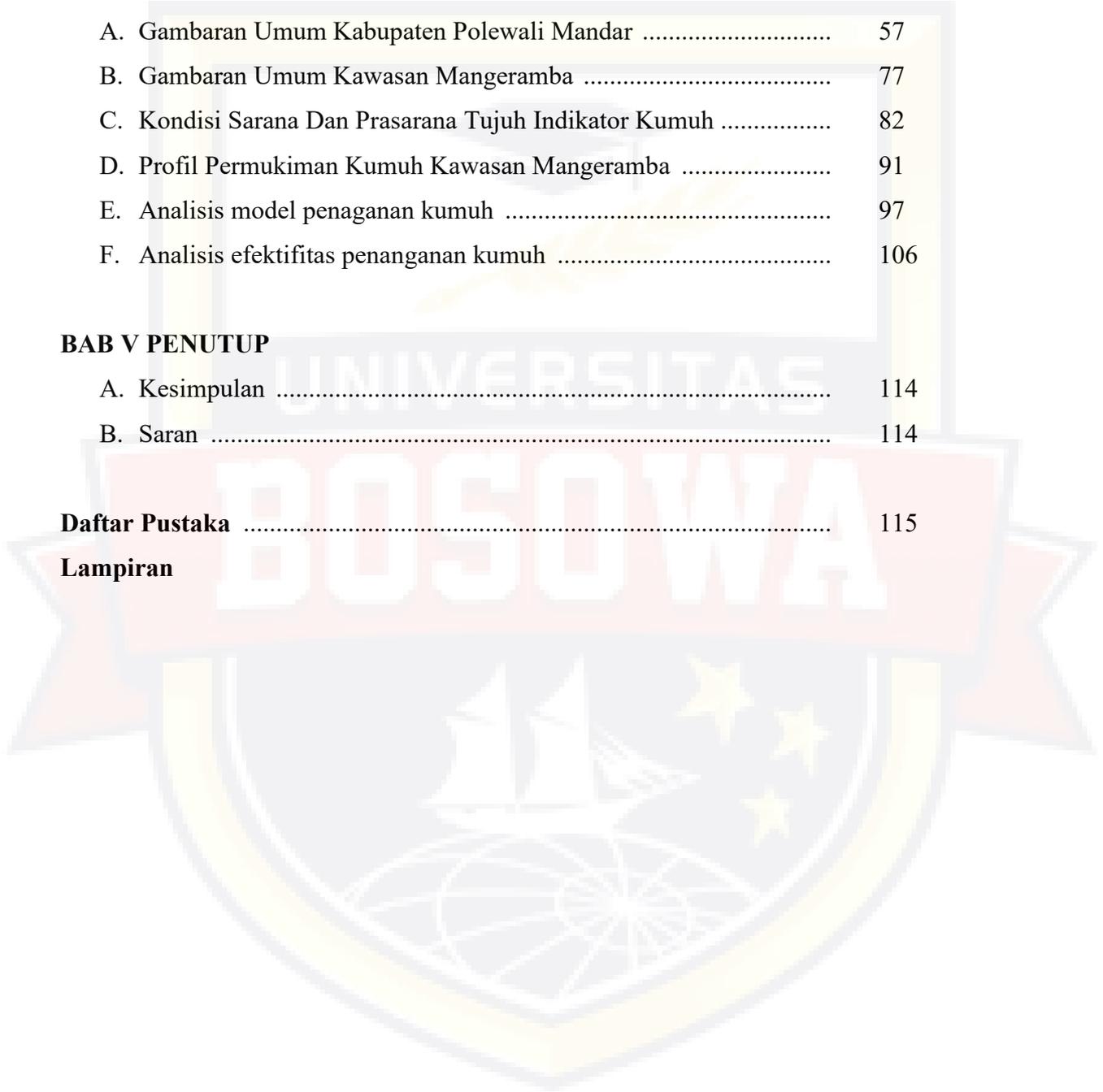
A. Gambaran Umum Kabupaten Polewali Mandar	57
B. Gambaran Umum Kawasan Mangeramba	77
C. Kondisi Sarana Dan Prasarana Tujuh Indikator Kumuh	82
D. Profil Permukiman Kumuh Kawasan Mangeramba	91
E. Analisis model penanganan kumuh	97
F. Analisis efektifitas penanganan kumuh	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran	114

Daftar Pustaka	115
-----------------------------	-----

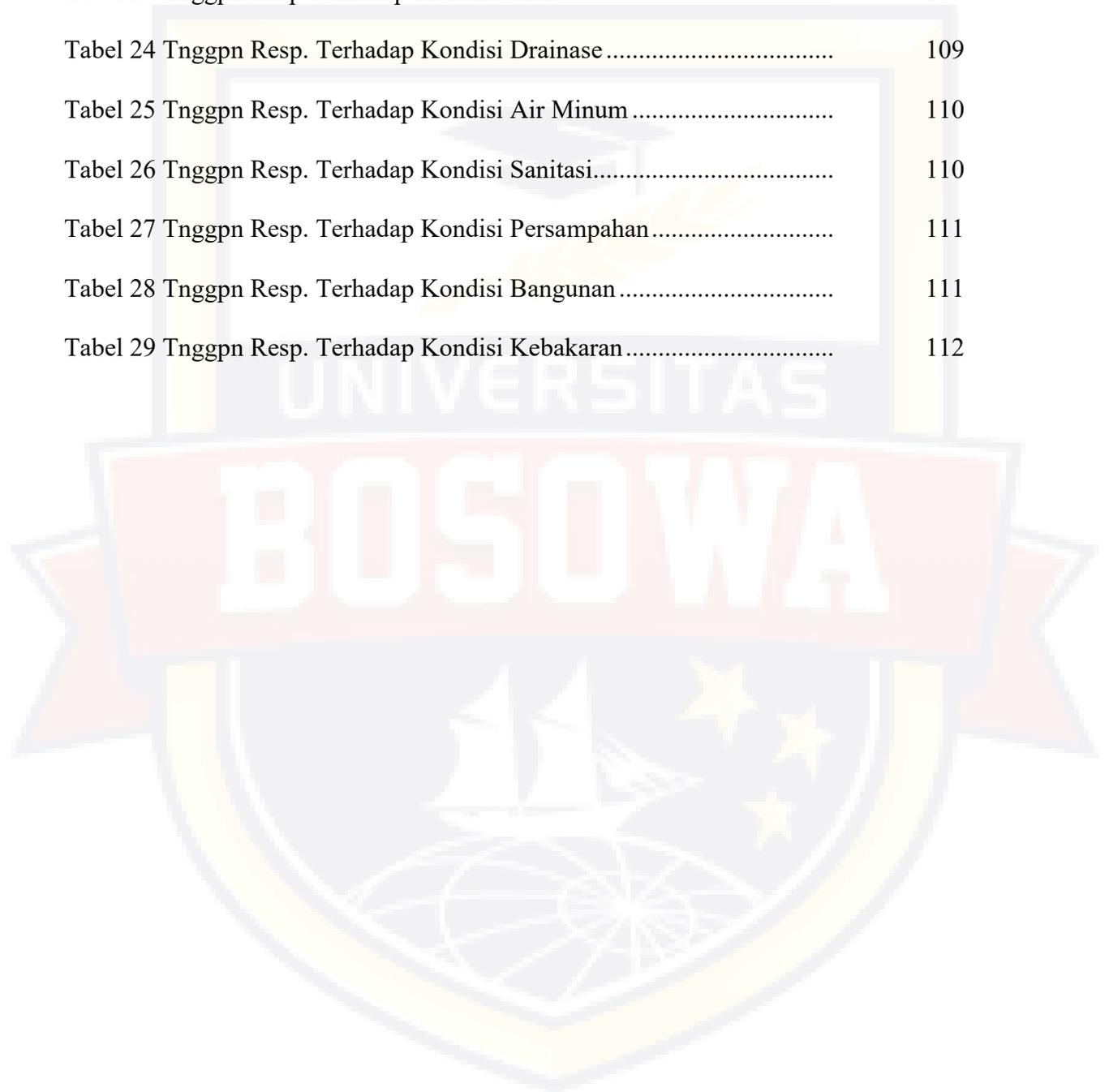
Lampiran



DAFTAR TABEL

Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Tabel 1 Matrik Rencana Penelitian	40
Tabel 2 Data Kebutuhan Penelitian.....	42
Tabel 3 Kategori Tabulasi	50
Tabel 4 Variabel Penelitian	54
Tabel 5 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kab. Polewali Mandar...	59
Tabel 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Tahun 2014 sd 2018	62
Tabel 7 Jumlah Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan.....	63
Tabel 8 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha	65
Tabel 9 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.....	68
Tabel 10 Jumlah Penduduk Menurut Agama	70
Tabel 11 Sebaran Luasan Kumuh Kabupaten Polewali Mandar	73
Tabel 12 Permasalahan Jalan.....	83
Tabel 13 Permasalahan Drainase	84
Tabel 14 Permasalahan Limbah	86
Tabel 15 Permasalahan Air Minum	87
Tabel 16 Permasalahan Persampahan	88
Tabel 17 Permasalahan Bangunan	89
Tabel 18 Permasalahan Kepadatan Bangunan.....	90
Tabel 19 Profil Permukiman Kumuh Kawasan Mangeramba	92
Tabel 20 Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kumuh Non Fisik.....	98

Tabel 21 Wewenang Penanganan Kumuh Berdasarkan Luasan Kumuh.....	100
Tabel 21 Pelaksanaan Fisik Di Kawasan Mangeramba 2015-2019.....	102
Tabel 22 Hasil Penanganan Kawasan Kumuh Lingkungan Mangeramba...	107
Tabel 23 Tnggpn Resp Terhadap Kondisi Jalan	109
Tabel 24 Tnggpn Resp. Terhadap Kondisi Drainase	109
Tabel 25 Tnggpn Resp. Terhadap Kondisi Air Minum	110
Tabel 26 Tnggpn Resp. Terhadap Kondisi Sanitasi.....	110
Tabel 27 Tnggpn Resp. Terhadap Kondisi Persampahan	111
Tabel 28 Tnggpn Resp. Terhadap Kondisi Bangunan	111
Tabel 29 Tnggpn Resp. Terhadap Kondisi Kebakaran.....	112



DAFTAR GAMBAR

Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar.....	viii
Gambar 1 Prosedur Analisis Kebijakan	19
Gambar 2 Peta Kabupaten Polewali Mandar	60
Gambar 3 PDRB Perkapita	66
Gambar 4 Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Mangeramba.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang dengan kondisi demografi yang tidak stabil tercermin pada angka pertumbuhan penduduk yang tak terkendali. Parahnya jumlah penduduk yang cukup besar tidak dibarengi dengan perbaikan dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Kondisi perekonomian yang morat-marit semakin menambah angka kemiskinan di Indonesia yang berdampak pada degradasi kondisi fisik dan non fisik kehidupan dan penghidupan masyarakat yang secara nyata dan jelas tercermin pada menurunnya kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakatnya. Dari 2 (dua) hal pokok inilah, yakni : angka pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan kondisi perekonomian yang buruk, terjadilah apa yang disebut dengan permasalahan perumahan dan permukiman bahkan yang paling buruk adalah terbentuknya permukiman kumuh atau kawasan kumuh.

Meluasnya lingkungan permukiman di perkotaan terlebih dengan daerah pesisir pantai di kawasan perkotaan dapat menimbulkan dampak pada peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir perkotaan, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik social, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman serta seringnya keluhan masyarakat miskin mengenai rendahnya kualitas lingkungan ditempat mereka bermukim (degradasi lingkungan).

Pemerintah melalui RPJMN menargetkan Indonesia bebas kumuh menjadi 0% di tahun 2019, dengan kawasan permukiman kumuh saat ini luasnya 38.431 hektar, 23.473 hektar diantaranya berada di wilayah perkotaan dan 11.957 hektar berada di wilayah perdesaan. “Khusus untuk wilayah perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan berbagai program penanganan permukiman kumuh salah satunya adalah Program KOTAKU,”

Pemerintah menekankan pengentasan kumuh dengan mendorong kolaborasi semua pihak seperti, pemerintah daerah, swasta, lembaga masyarakat dan juga masyarakat itu sendiri. Salah satu output program penanganan kumuh ialah tersusunnya dokumen perencanaan penanganan kumuh berbasis masyarakat. Dimana dokumen ini disusun oleh masyarakat dan didampingi oleh fasilitator program yang bersangkutan seperti KOTAKU, BSPS, dll.

Program penanganan kumuh Kab Polewali mandar memiliki target kawasan kumuh sebesar 57 Ha, angka lokasi ini keluar berdasarkan surat keputusan bupati tahun 2017. Dari 57 Ha, 15 Ha berada di kawasan pesisir Kota Polewali. Hal ini sangat menarik untuk ditilik lebih jauh mengapa kawasan pesisir sangat mendominasi kawasan kumuh dan mengaitkannya dengan konsep program penanganan kumuh.

Untuk Kab. Polewali Mandar khususnya di kawasan kumuh mangeramba sejak tahun 2017 hingga 2019 ini telah banyak program penanganan kumuh yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah baik melalui anggaran APBD Kabupaten, program program nasional seperti KOTAKU, BPSP serta melalui *CSR (Corporate Social Responsibility)* yang telah menelan anggaran kurang lebih sebesar 3 Milyar Rupiah, anggaran yang begitu besar tentu mengharapkan keberhasilan yang besar juga, oleh

karena itu menurut peneliti hal ini menarik untuk dikaji sejauh mana keberhasilan penanganan kumuh yang telah dilakukan di Kelurahan Takatidung.

Mengevaluasi tentang program penanganan kumuh adalah mengevaluasi proses yang mencakup keberhasilan dalam penanganan kumuh meliputi 7 (Tujuh) indikator kumuh. Penelitian ini didasari oleh keinginan untuk melihat sejauh mana pencapaian RPJMN dalam pengentasan kumuh di Kelurahan Takatidung dan keinginan untuk melahirkan penelitian yang mampu memberi referensi masukan dalam penanganan kumuh di Kelurahan Takatidung mengingat Kelurahan Takatidung dijadikan sebagai kawasan Kumuh Skala Kota yang akan mendapatkan intervensi penanganan dalam anggaran *loan World Bank* sebesar 2 Milyar Rupiah dan penanganan anggaran melalui APBD Provinsi melalui Dinas Permukiman secara bersamaan di tahun 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahannya

1. Bagaimana pola penanganan kawasan kumuh di Mangeramba Kelurahan Takatidung Kab. Polewali Mandar ?
2. Bagaimana efektifitas program penanganan kumuh di Mangeramba Kelurahan Takatidung Kab. Polewali Mandar ditinjau dari segi infrastruktur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola penanganan dan efektifitas program penanganan kumuh di kawasan Mangeramba Kab. Polewali Mandar ditinjau dari segi infrastruktur 7 (Tujuh) Indikator kumuh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi arahan serta memberikan gambaran bagi pengembangan kegiatan penanganan permukiman kumuh secara efektif.
2. Menambah referensi pustaka yang berhubungan dengan permasalahan permukiman kumuh perkotaan melalui penanganan permukiman kumuh yang lebih efektif..

E. Ruang Lingkup Penelitian (Substansi dan Teritorial)

1. Ruang Lingkup Substansial

Dalam penelitian tentang Program Program penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan di Kelurahan Takatidung, maka secara garis besar pembahasannya akan dibatasi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut :

- a. Menganalisis kondisi sarana prasarana permukiman sebelum dan sesudah adanya program penanganan permukiman kumuh, dalam hal ini dibatasi dalam pembahasan Tujuh Indikator Kumuh menurut Undang Undang nomor 1 Tahun 2011 yaitu :

- Jalan
- Drainase
- Sanitasi
- Air Minum
- Persampahan
- Bangunan Hunian

- Proteksi Kebakaran
- b. Menganalisis efektifitas Program dalam pengurangan Permukiman kumuh di Kelurahan Takatidung.

2. Ruang Lingkup Spasial

Lingkup penelitian dibatasi pada kawasan kumuh dengan luas 15 Ha di kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan melalui surat keputusan Bupati sebagai salah satu lokasi kumuh.

F. Sistematika Pembahasan

Substansi pembahasan dalam proposal penelitian ini dilakukan dalam 3 (tiga) bab, yang meliputi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan kajian pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang lingkup Penelitian dan Sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan terkait landasan dan pijakan teori yang mendukung untuk menjawab rumusan pertanyaan dalam penelitian ini yang menjelaskan antara lain tentang defenisi permukiman kumuh, model evaluasi program kebijakan, serta dikaitkan dengan program program penanganan permukiman kumuh yang telah

dilaksanakan di Kelurahan Takatidung dalam kurung waktu dua tahun terakhir 2017 sampai 2019

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai Jenis Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, Metode Analisa, Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional terkait variabel dan indikator penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang hasil dari penelitian seperti gambaran umum kabupaten, gambaran umum kawasan kumuh serta terdapat pembahasan tentang rumusan rumusan masalah yang telah ditetapkan pada BAB I

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang menjelaskan rekomendasi dan saran atas penemuan empiris yang didapatkan pada saat melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Permukiman kumuh

Menurut Sri Kurniasih, (2007:30) Permukiman kumuh adalah permukiman dengan rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

Menurut Khomarudin (2009:26) lingkungan permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Lingkungan yg berpenghuni padat (melebihi 500 org per Ha)
2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah
3. Jumlah rumahnya sangat padat dan ukurannya dibawah standart
4. Sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan
5. Hunian dibangun diatas tanah milik negara atau orang lain dan diluar perundangundangan yang berlaku. (Khomarudin, 1997: 83-112).

Permukiman kumuh yaitu permukiman yang padat, kualitas konstruksi rendah, prasarana, dan pelayanan minim adalah pengejawantahan kemiskinan (Tjuk Kuswantojo, 2005). Sedangkan menurut Parsudi Suparlan, permukiman kumuh adalah permukiman atau perumahan orang-orang miskin kota yang

berpenduduk padat, terdapat di lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan, juga biasa disebut dengan wilayah pencomberan atau semerawut. Pengertian lain dari permukiman kumuh juga diungkapkan oleh Johan Silas yaitu permukiman kumuh dapat diartikan menjadi dua bagian, yang pertama ialah kawasan yang proses pembentukannya karena keterbatasan kota dalam menampung perkembangan kota sehingga timbul kompetisi dalam menggunakan lahan perkotaan. Sedangkan kawasan permukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio permukiman kumuh.

Kawasan pemukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharjo: 1997).

Kumuh atau slum adalah permukiman atau perumahan orang-orang miskin kota yang berpenduduk padat, terdapat di pinggir-pinggir jalan atau lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan atau juga biasa disebut dengan wilayah pencomberan oleh Suparlan. Tetapi pada perincian ini permukiman kumuh dianggap sebagai tempat anggota masyarakat kota yang mayoritas berpenghasilan rendah dengan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi minim. (Raharjo, 2005:147).

Definisi *slum* menurut Abrams dalam Usep Surahman 2008, adalah ;
The word slum is a catchall for poor housing of every kind as a label for the environment. (Abrams;1964; 3).

Menurut Rindrojono, (2013) Kumuh adalah gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan rendah. Dengan kata lain, kumuh dapat di artikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan.

Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

Ciri-ciri pemukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Rindrojono, (2013) adalah :

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.

4. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu

terwujud sebagai :

- a. Sebuah komunitas tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
- b. Satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
- c. Sebuah satuan komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.

5. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.

6. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informil.

Berdasarkan salah satu ciri diatas, disebutkan bahwa permukiman kumuh memiliki ciri “kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin”. Penggunaan ruang tersebut berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul

pada daerah sempadan untuk kebutuhan Ruang Terbuka Hijau. Keadaan demikian menunjukkan bahwa penghuninya yang kurang mampu untuk membeli atau menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan/bangunan yang tinggi, sedangkan lahan kosong di daerah perkotaan sudah tidak ada. Permukiman tersebut muncul dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan penghuni. Dengan begitu, permukiman yang berada pada kawasan SUTET, sempadan sungai, sempadan rel kereta api, dan sempadan situ/danau merupakan kawasan permukiman kumuh.

Menurut Ditjen Bangda Depdagri, ciri-ciri permukiman atau daerah perkampungan kumuh dan miskin dipandang dari segi sosial ekonomi adalah sebagai berikut

1. Sebagian besar penduduknya berpenghasilan dan berpendidikan rendah, serta memiliki sistem sosial yang rentan.
2. Sebagian besar penduduknya berusaha atau bekerja di sektor informal
Lingkungan permukiman, rumah, fasilitas dan prasarananya di bawah standar minimal sebagai tempat bermukim, misalnya memiliki:
 - a. Kepadatan penduduk yang tinggi > 200 jiwa/km²
 - b. Kepadatan bangunan > 110 bangunan/Ha.
 - c. Kondisi prasarana buruk (jalan, air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan).

- d. Kondisi fasilitas lingkungan terbatas dan buruk, terbangun <20% dari luas persampahan.
- e. Kondisi bangunan rumah tidak permanen dan tidak memenuhi syarat minimal untuk tempat tinggal.
- f. Permukiman rawan terhadap banjir, kebakaran, penyakit dan keamanan.
- g. Kawasan permukiman dapat atau berpotensi menimbulkan ancaman (fisik dan non fisik) bagi manusia dan lingkungannya.

Melihat uraian dan pandangan tentang kumuh diatas, disimpulkan bahwa kumuh yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keterbatasan terhadap akses prasarana lingkungan, kualitas dan layanan lingkungan yang rendah/buruk.

Menurut Undang–Undang No. 1 pasal 1 ayat 13 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dan, perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Permukiman kumuh merupakan akumulasi dari ketidakmampuan masyarakat untuk memelihara rumah dan lingkungannya, serta ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola kawasan permukiman serta menyediakan sarana dan prasarana dasar (Buletin Cipta Karya, 2015).

B. Evaluasi

Teori mengenai evaluasi disampaikan oleh Arikunto dan Cepi (2008 : 2), bahwa : Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Arikunto (2009 : 3) bahwa mengukur adalah , membandingkan sesuatu dengan satu ukuran (bersifat kuantitatif), menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk (bersifat kualitatif), dan evaluasi meliputi kedua langkah tersebut di atas.

Crawford (2000 : 13), mengartikan penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan.

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat ditarik benang merah tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. “Efektifitas merupakan perbandingan antara output dan inputnya sedangkan efisiensi adalah taraf

pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu proses” (Sudharsono dalam Lababa, 2008).

Jadi evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula.

Pemahaman mengenai pengertian evaluasi dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariasi oleh para pakar evaluasi. Menurut Stufflebeam dalam Lababa (2008), evaluasi adalah *“the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives,”* Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Masih dalam Lababa (2008), Worthen dan Sanders mendefinisikan *“evaluasi sebagai usaha mencari sesuatu yang berharga (worth).* Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu”.

Tague-Sutcliffe (1996 : 1-3), mengartikan evaluasi sebagai *“a systematic process of determining the extent to which instructional objective are achieved by pupils”.* Evaluasi bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas.

Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program.

Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Hubungan antara pengukuran dan penilaian saling berkaitan. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran atau kriteria tertentu (meter, kilogram, takaran dan sebagainya), pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian berarti menilai sesuatu. Sedangkan menilai itu mengandung arti, mengambil keputusan terhadap sesuatu yang berdasarkan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainya. Dan penilaian bersifat kualitatif.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah kegiatan menilai mencari terobosan baru untuk penyempurnaan. Evaluasi sekaligus sebuah proses analisis yang menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang memberikan penilaian terhadap kinerja sebuah program, kebijakan dan atau sebuah kegiatan. Proses evaluasi sekaligus memberikan tanggapan terhadap sebuah pertanyaan, "Apa perbedaan yang dibuat?". Artinya evaluasi merupakan analisa terhadap sebuah fakta dan tanggapan yang dihasilkan ketika sebuah program atau kebijakan dilaksanakan. (Dunn :2000:36)

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan atau program. Secara umum istilah evaluasi dapat diartikan sebagai penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk melakukan analisa hasil sebuah kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam artian yang lebih spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini dapat disebut bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau dapat diatasi.

Deskripsi utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Pertanyaan yang terlontar tentang evaluasi bukanlah mengenai fakta (apakah sesuatu ada?) atau aksi (Apakah yang harus dilakukan?). Tetapi berhubungan dengan nilai (Berapa nilainya?). Karenanya evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan metode analisis kebijakan lainnya, yaitu :

1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu

dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

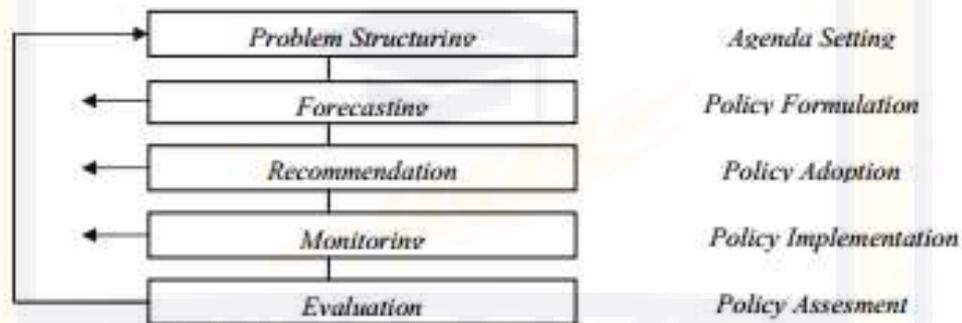
2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik 'fakta' maupun 'nilai'. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan yang demikian harus didukung oleh bukti-bukti bahwa hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.
3. Orientasi masa kini dan masa lampau, Tuntutan evaluasi, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, dibandingkan hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante).
4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada. Dapat dianggap sebagai intrinsik ataupun ekstrinsik. Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Evaluasi memainkan sejumlah peran utama dalam sebuah analisis kebijakan. Pertama, bahwa evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kinerja kebijakan. Dapat diketahui seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (contohnya; perbaikan sarana jalan) dan target tertentu (misalnya, 20 % pengurangan pengangguran).

Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kesesuaian tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai (misalnya kelompok masyarakat) maupun landasan kebijakan dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif).

Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diimplementasikan sebelumnya perlu dikaji ulang atau digantikan dengan kebijakan yang lain.

Evaluasi atau penilaian terhadap sebuah kebijakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Proses Kebijakan yang terdiri dari beberapa tahapan.(Dunn:2000:608)



GAMBAR 2.1
PROSEDUR ANALALISIS KEBIJAKAN

Dari gambaran di atas, dapat dilihat bahwa adanya sebuah kebijakan dimulai dari adanya isu atau masalah yang kemudian diagendakan untuk dicari pemecahannya. Kemudian dilakukan formulasi kebijakan dengan mencari beberapa alternatif kebijakan yang dapat memecahkan masalah tersebut melalui metode forecasting (peramalan). Langkah selanjutnya adalah menetapkan atau memilih alternatif pemecahan yang dianggap paling baik. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Setiap tahap tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi atau bahkan menjadi umpan balik (feed back) bagi agenda setting berikutnya (yang baru). Dari proses tersebut bahwa evaluasi kebijakan atau program menempati urutan paling akhir, artinya bagaimana sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil atau berjalan dengan baik atau bahkan program tersebut dikatakan gagal, proses tersebut ada dalam tahap evaluasi (policy assesment).

Sebuah kebijakan harus diikuti oleh proses adanya tindakan (policy implementation). Dari tindakan tersebut akan memberikan hasil (out put) tertentu dan dampak tertentu sesuai kebijakan tersebut. Hasil atau out put beserta dampak yang ada akan menjadi feed back (umpan balik) bagi kebijakan lainnya atau menjadi perbaikan (evaluasi) bagi kebijakan sebelumnya. Dari gambar II. tersebut di atas, dapat diberikan penjelasan bahwa tahap evaluasi memegang peranan yang signifikan bagi keberhasilan suatu kebijakan atau program. Dengan dilakukannya evaluasi (policy assesment), maka suatu program akan dapat dinilai dengan hasil yang dicapai dan dampak yang ditimbulkan, apakah sudah sesuai dengan harapan atautkah masih jauh dari tujuan dari kebijakan atau program.

Oleh karena itu, studi evaluasi akan dapat menjawab bagaimana suatu kebijakan dilaksanakan, apa kendalanya, apakah program dapat mencapai sasaran, variabel-variabel apa sajakah yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan atau program.

Analisis evaluasi akan dapat membantu mengetahui tingkat kepatuhan, menemukan konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang tidak diharapkan, mengidentifikasi hambatan dan kendala-kendala yang ada dan menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan.

Teori evaluasi kebijakan akan dapat mengetahui peran para aktor dalam pembuatan kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan melalui beberapa proses. Pertama, proses pengkajian kebijakan. Dalam proses pengkajian harus

memahami metode analisis yang bertujuan menciptakan, menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

Evaluasi kebijakan dalam memperbaiki pelaksanaan suatu program dan hasilnya perlu empat tahap. Pembuatan materi, komunikasi interaktif dan pemanfaatan pengetahuan. Pengetahuan menunjukkan pada akal sehat yang dapat meningkatkan efisiensi pilihan atas berbagai alternatif kebijakan. Informasi yang relevan dengan kebijakan perlu dikaji untuk pembuatan kebijakan sesuai dengan metodologi analisis dan prosedur evaluasi. Ada 5 (lima) tipe informasi yang relevan dengan kebijakan, yaitu masalah kebijakan, hasil kebijakan, kinerja kebijakan, masa depan kebijakan dan aksi kebijakan (Dunn: 2000:623). Metodologi evaluasi akan memberikan tuntunan umum meskipun belum terpercay dan benar-benar membimbing para analisis.

Kedua, proses pembuatan kebijakan. Proses evaluasi kebijakan merupakan aktifitas intelektual dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Proses pembuatan kebijakan sangat terkait dengan perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi.

Ketiga, proses komunikasi kebijakan, yang terkait dengan dokumen yang relevan dengan kebijakan, presentasi kebijakan, pelaku kebijakan dan penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

Dari teori evaluasi kebijakan tersebut akan dipakai dasar untuk mengevaluasi Program Penanganan Kumuh Di Kelurahan Takatidung Kab. Polewali Mandar Secara sederhana proses kebijakan diartikan sebagai

serangkaian tindakan memproses kepentingan publik menjadi sebuah keputusan kebijakan untuk dilaksanakan.

Secara akademisi ruang lingkup kebijakan publik meliputi: teori kebijakan publik yaitu sebagai ilmu, analisis kebijakan yaitu memprediksi dampak sebelum kebijakan diterapkan, implementasi kebijakan yaitu menilai bagaimana kebijakan itu dioperasikan atau dilaksanakan, evaluasi kebijakan yaitu menjawab masalah yang timbul sebagai akibat dari implementasi kebijakan dan mengantisipasi di masa depan.

Sebuah kebijakan harus diikuti oleh proses adanya tindakan (policy implementation). Dari tindakan tersebut akan memberikan hasil (out put) tertentu dan dampak tertentu sesuai tujuan dari kebijakan itu. Hasil atau out put beserta dampak yang ada akan menjadi feed back (umpan balik) bagi kebijakan lainnya atau menjadi perbaikan (evaluasi) bagi kebijakan sebelumnya. Tahap evaluasi memegang peranan yang signifikan bagi keberhasilan suatu kebijakan atau program. Dengan dilakukannya evaluasi (policy assesment), maka satu program akan dapat dinilai dengan hasil yang dicapai dan dampak yang ditimbulkan, apakah sudah sesuai dengan harapan atau masih jauh dari tujuan dari kebijakan atau program.

Dalam hal implementasi Program Program Penanganan Kumuh Di Kelurahan Takatidung Kab. Polewali Mandar dilakukan juga proses pemantauan pengawasan.

Pemantauan implementasi program dilaksanakan dalam sebuah Tim Koordinasi di berbagai tingkatan (desa, kecamatan, kabupaten bahkan

provinsi). Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala maupun insidental bahkan dimungkinkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan. Pelaporan dalam rangka pengendalian kegiatan Program Penanganan Kumuh Di Kawasan Mangeramba Kelurahan Takatidung Kab. Polewali Mandar) dilaksanakan secara periodik dan berjenjang. Pengawasan dilaksanakan melalui jalur struktural dan fungsional oleh aparat, fungsional maupun konsultan.

C. Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (2002:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Menurut Effendy (2008:14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”.

Pengertian lain menurut Susanto (2005:156), “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi”. Menurut pengertian Susanto di atas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri (Sedarmayanti, 2006:61).

Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Sedangkan Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2005) mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas. Ia mengatakan indikator efektivitas sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus.

Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan.

D. Program penanganan permukiman kumuh

Dalam outline Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikeluarkan yaitu terkait Kebijakan dan Program Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2015-2019, yaitu : *Arah Kebijakan*, Menciptakan Lingkungan yang memungkinkan, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh, mencegah pembentukan kumuh baru. *Strategi pokok*, menyediakan lahan perumahan untuk MBR, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, fasilitasi pembangunan perumahan swadaya, menangani permukiman kumuh secara komprehensif dan terpadu dengan rencana kota, memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR, menyediakan pelayanan dasar yang terpadu dengan sistem kota.

Lebih lanjut dalam Buku Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

diungkapkan yaitu : *Kebijakan*, Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan di Kawasan Permukiman Kumuh, dengan *Strategi*, menyiapkan landasan penyelenggaraan, membangun sistem dan informasi perumahan dan permukiman kumuh nasional, membangun kelembangaan penanganan di pusat dan daerah, membangun dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan membangun kesadaran masyarakat serta memperkuat kapasitas dan peran masyarakat.

Sampai dengan saat ini, belum ada kebijakan dan strategi khusus untuk mengatasi Kawasan kumuh, kecuali Undang-Undang yang sering dipergunakan sebagai dasar pembangunan permukiman yaitu UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sekalipun sebenarnya Penanganan kawasan kumuh tidak cukup diselesaikan melalui penanganan kawasan permukiman, tetapi harus diangkat pada level yang lebih tinggi yaitu di tingkat kota, mengingat kompleksitas persoalannya dan tumbuhnya kawasan kumuh salah satu sebabnya adalah karena urbanisasi ke kota, jadi secara sistemik dia berada pada sistem skala kota.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Prt/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, dipertegas lagi dan dijelaskan tentang mekanisme dan tata cara arahan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Dengan lingkup atau cakupannya adalah meliputi:

- kriteria dan tipologi;
- penetapan lokasi dan perencanaan penanganan;
- pola-pola penanganan;
- pengelolaan; dan
- pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

Kebijakan dan Strategi Penataan Permukiman Kumuh Kab Polewali

Mandar

Dalam arahan kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Kab Polewali Mandar 2014-2024 merumuskan arahan kebijakan pembangunan kawasan dan tata ruang, yang dituangkan dalam pembangunan infrastruktur dan lingkungan diarahkan pada ketersediaan perumahan dan permukiman, sarana transportasi, air bersih, listrik, sarana rekreasi dan wisata, sarana kebersihan dan keindahan kota yang sejalan dengan perkembangan penduduk, tata ruang kota, kemajuan ekonomi yang mendukung, perwujudan Polewali yang berwawasan lingkungan dan bersahabat. Serta penciptaan lingkungan yang bersih, indah, lestari dan sehat yang mendukung terwujudnya ketentraman, kenyamanan dan kedamaian bagi warga.

Dalam rumusan arahan kebijakan RPJMD Kab Polewali terkait kebijakan pembangunan tata ruang dan lingkungan telah dirumuskan arahnya untuk Peningkatan dan pemeliharaan lingkungan perumahan, permukiman dan penataan kawasan kumuh.

Arahan kebijakan dan strategi penanganan permukiman kumuh Kab Polewali sejatinya telah tertuang dalam program dan kegiatan yang lebih aplikatif melalui program-program yaitu antara lain Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kesemua program ini merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi yang telah tertuang dalam RPJMD Kab Polewali

Program Kota Tanpa Kumuh KOTAKU

Program KOTAKU adalah program yang dilaksanakan secara nasional yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Program KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

- a. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
- b. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;

Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

- a. Keteraturan bangunan
- b. Jalan Lingkungan;
- c. Drainase Lingkungan,
- d. Penyediaan Air Bersih/Minum;
- e. Pengelolaan Persampahan;
- f. Pengelolaan Air Limbah;
- g. Pengamanan Kebakaran; dan
- h. Ruang Terbuka Publik.

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dsb.

Pola Penanganan

Sesuai dengan tujuan program, penanganan permukiman kumuh yang dimaksud dalam Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Cakupan kerja penanganan kumuh dalam Program KOTAKU berdasarkan kondisi kualitas permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu:

a. Pencegahan

Tindakan pencegahan kumuh meliputi pengelolaan dan pemeliharaan kualitas perumahan dan permukiman, serta dengan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru. Pencegahan kumuh meliputi pengembangan aturan bersama, sosialisasi semua peraturan yang berlaku dalam pembangunan hunian (mis. tata ruang, IMB, garis sempadan sungai), peningkatan kapasitas pelaku pembangunan, penegakan aturan-aturan tersebut, pengendalian/monitoring, pemeliharaan secara rutin dan pengecekan terhadap ijin bangunan dan standar teknis, pemberdayaan masyarakat melalui

penyediaan fasilitas pendukung pengembangan penghidupan, akses terhadap informasi, dan penyediaan infrastruktur dasar dan pengembangan penghidupan untuk masyarakat.

b. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali (perhatikan ketentuan khusus terkait permukiman kembali pada Kerangka Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan yang terdapat di lampiran 3 atau Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial).

c. Pengelolaan

1. Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan;
2. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya;
3. Pengelolaan oleh masyarakat difasilitasi oleh pemerintah daerah baik dukungan pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan; dan
4. Pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan berbagai sumber pendanaan.

Aspek yang ditangani mencakup seluruh aspek yang diidentifikasi sebagai gejala dan penyebab kumuh, baik dari aspek sosial, ekonomi, fisik lingkungan, maupun aspek legal yang bertujuan untuk pencapaian visi kota tanpa kumuh.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Pasal 27 ayat (1), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, mengamanatkan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan BSPS. Penyelenggaraan BSPS dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan pembangunan baru rumah swadaya serta insentif pembangunan baru rumah swadaya dalam 1 (satu) hamparan berupa prasarana, sarana, dan utilitas umum.

BSPS pada prinsipnya berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya. Hal ini diperuntukan bagi rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. BSPS diharapkan dapat menumbuhkembangkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan, keluarga, kerabat, dan/atau tetangga. Bentuk keswadayaan masyarakat dapat berupa tambahan dana keluarga, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya.

E. Konstruksi Teori

Arikunto dan Cipi (2008 : 2), bahwa : Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Crawford (2000 : 13), mengartikan penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan,

keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan.

H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (2002:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Menurut Effendy (2008:14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: ”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan

Berangkat dari tinjauan teori inilah kemudian peneliti menyimpulkan pengertian evaluasi yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, sebagai dasar tesis untuk mengkajinya lebih lanjut yaitu “Evaluasi Program Penanganan Kawasan Kumuh Kelurahan Takatidung.

Selanjutnya untuk variabel penanganan permukiman defenisi operasional mengacu pada konsep dan model penanganan permukiman yang ada dalam UU No. 1 Tahun 2011, yaitu disebutkan dalam Bab VIII pasal 94 sampai pasal 97 bahwa ada 2 (dua) Konsep terkait penanganan yaitu Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman, dengan implementaasi kegiatan yang mengarah pada tujuan yang menjadi indikator pengukuran dalama penelitian ini yaitu pemugaran dan peremajaan prasarana lingkungan dan bangunan permukimandalam mengurangi tingkt kekumuhan kawasan permukiman di lokasi penelitian.

Berikutnya adalah permukiman kumuh defenisi operasional yang dipakai adalah berangkat dari rangkuman dari teori permukiman kumuh yang sudah ada yaitu Sri kurniahningsi (2007:30) Permukiman kumuh adalah permukiman dengan rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Dimana peneliti menyimpulkan bahwa teori inilah yang berpendapat bahwa keberhasilan penanganan kawasan kumuh dilihat dari kondisi infrasturktur yang sesuai dengan standart yang berlaku.

F. Peneliti Terdahulu

Adapun penelitian yang relevan terkait evaluasi program penanganan kawasan kumuh yang telah dilakukan sebelumnya pada tahun 2018 Syamsul Bahri Efektifitas Penanganan Kumuh di Tanete Riatta Kab. Bone. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki tingkat efektifitas paling tinggi dalam upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur. Sementara pengawasan, pengendalian, dan revitalisasi memiliki tingkat efektifitas sedang dalam upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur..

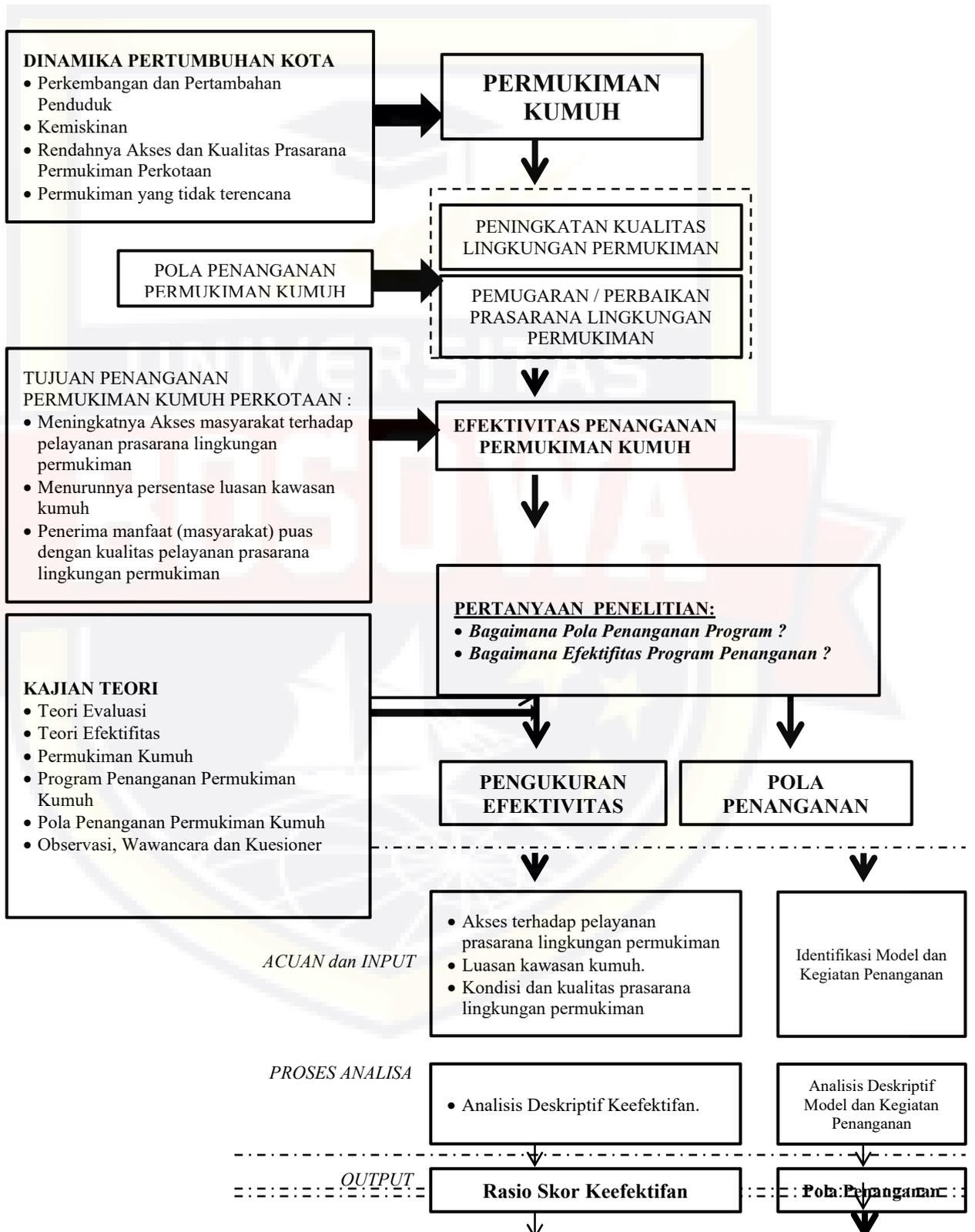
Ismawati (2018) dengan judul penelitian “Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kec Bontoramba Kab Jeneponto” yang hasil penelitiaanya mengungkapkan bahwa Program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya Belum sepenuhnya terlaksana sesuai pedoman teknis, dan efektifitas program ini belum sepenuhnya tercapai dikarenakan adanya mekanisme yang tidak sesuai petunjuk yang telah ditetapkan, efektifitas hanya tercapai pada munculnya jiwa social masyarakat yang membantu penerima manfaat program tersebut.



G. Kerangka Pikir

Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Studi dilakukan melalui kajian-kajian teori dan kajian kajian dokumen untuk mencari dan menyusun parameter-parameter serta indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas pembangunan infrastruktur fisik dalam mengurangi tingkat kekumuhan kawasan permukiman, selanjutnya parameter – parameter tersebut diterapkan untuk mencari pembuktian secara empiris dengan berdasarkan data yang ada dan ditemukan dilapangan. Penelitian ini juga dilakukan melalui pendekatan evaluasi kegiatan penanganan dan penataan lingkungan permukiman, dimana evaluasi dibatasi pada evaluasi efektivitas. Evaluasi efektivitas merupakan evaluasi yang menguji apakah tindakan dari kegiatan menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan (tangkilisan, 2003). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk membuktikan efektivitas tingkat pencapaian tujuan dari diadakannya penanganan permukiman melalui pembangunan prasarana dalam mengurangi tingkat kekumuhan kawasan permukiman.

Berdasarkan uraian pendekatan penelitian tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sugiyono (2014) menyebutkan bahwa peneltian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji rumusan masalah yang telah ditetapkan. Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Dengan demikian peneliti dapat menentukan variabel – variabel dari objek yang diteliti kemudian membuat parameter dan indikator untuk dijadikan ukuran efektivitas.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kawasan Mangeramba berdasarkan SK. Bupati tentang Profil Kawasan Kumuh Kab. Polewali Mandar memiliki luas permukiman kumuh sebesar 7.0 Ha berada di lingkungan mangeramba.

Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah mewakili kawasan permukiman kumuh di Kab. Polewali Mandar yang telah melaksanakan kegiatan penataan lingkungan permukiman dan secara umum juga mewakili tingkat keberhasilan dan kegagalan program penataan lingkungan permukiman pada kawasan, serta secara geografis mewakili beberapa kawasan yang ada di Kab. Polewali Mandar yaitu berada pada Kawasan wilayah pesisir dan berada pada wilayah perkotaan/pusat kota. Berdasarkan identifikasi tingkat kekumuhan kawasan adalah kumuh berat, juga merupakan kawasan kumuh terluas di Kab. Polewali Mandar dengan jumlah rumah tangga terbanyak.

Jangka waktu penelitian ini akan ditentukan oleh keberadaan sumber data, interest dan tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang dibangun maka waktu yang dibutuhkan dalaam proses penelitian ini diperkirakan kurang lebih 5 (Lima) bulan.

Tabel 1 Matriks Rencana Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke 1				Bulan ke 2				Bulan ke 3				Bulan ke 4				Bulan ke 5			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■																		
2	Seminar Proposal			■																	
3	Pengambilan Data			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
4	Pengolahan Data													■	■	■	■				
5	Penyusunan Laporan																	■	■	■	■
6	Seminar Akhir																			■	■
7	Seminar Tutup																			■	■
8	Perbaikan Hasil																				■

C. Jenis dan Sumber Data

Data untuk mendukung penelitian ini dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara terhadap tokoh-tokoh kunci (key persons) yang berperan dalam pelaksanaan program. Data/informasi yang dibutuhkan adalah pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan dalam program penanganan kawasan kumuh di kawasan pesisir mangeramba.

2. Data Sekunder, yaitu data yang bukan dari diusahakan sendiri dalam pengumpulannya, diperoleh dari instansi terkait dalam penelitian.

Data yang diperlukan terdiri dari:

- a. Dokumen Program Penanganan Kawasan kumuh KOTAKU
- b. Program BSPS,
- c. Program Pamsimas,
- d. Anggaran Penanganan kumuh yang dibiayai APBN
- e. Anggaran Penanganan kumuh yang dibiayai APBD Provinsi
- f. Anggaran Penanganan kumuh yang dibiayai APBD Kabupaten
- g. Dana Kelompok Peduli
- h. Dana CSR
- i. Dana Aspirasi

Tabel. 2 Data yang dibutuhkan dalam penelitian

No	Kebutuhan Data	Jenis Data	Sumber Data	Ket.
I Data Primer				
1	Jenis dan sebaran prasarana lingkungan permukiman	Primer/Informasi langsung	Lapangan, masyarakat	Observasi dan Dokumentasi
2	Tinjauan Hasil dan Identifikasi Permukiman Kumuh sebelum dan setelah Penanganan dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Primer/Informasi langsung	Masyarakat, pengguna aktual, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintahan (Kelurahan, Kecamatan Instansi Terkait)	Survei, Observasi, Wawancara dan Serta Kajian Dokumen Literatur
3	Akses dan Layanan Prasarana lingkungan Permukiman	Primer/informasi langsung	Masyarakat berdasarkan populasi sampel terpilih responden	Observasi, Wawancara, Questioner
4	Manfaat dan Hasil Peningkatan Kualitas Prasarana lingkungan Permukiman	Primer/informasi langsung	Masyarakat berdasarkan populasi sampel terpilih responden	Observasi, wawancara, Questioner

II Data Sekunder

1	Program/Kebijakan	Sekunder/ informasi	PU,	Dinas	Dokumen
	Penanganan Permukiman kumuh	tidak langsung	Perumahan dan Bappeda		
2	- Kegiatan penataan prasarana lingkungan permukiman (Tujuan dan Sasaran)	Sekunder/ informasi tidak langsung	PU, Perumahan dan Bappeda Lembaga	Dinas dan	Dokumen dan
	- Kegiatan penataan prasarana lingkungan permukiman (Konsep dan Model Penanganan)		Kemasyarakatan		
3	Dokumen Perencanaan, Kebijakan Program dan Peraturan Perundang-undangan tentang Permukiman	Sekunder/ informasi tidak langsung	PU, Perumahan dan Bappeda	Dinas dan	Dokumen dan
4	Kajian Kepustakaan penanganan kumuh perkotaan tingkat kekumuhan kawasan	Literatur efektivitas permukiman terhadap pengurangan	Sekunder/informasi tidak langsung	buku-buku, website, karya ilmiah, studi penelitian	literatur

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Kepustakaan.

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku dan teori-teori atau dokumen-dokumen perencanaan yang berhubungan dengan materi penelitian. Kajian buku, teori dan dokumen dimaksud mencakup tentang evaluasi Kegiatan dan pengukuran efektivitas, permukiman perkotaan, permukiman kumuh, program dan kegiatan penanganan permukiman, kebijakan dan strategi penanganan permukiman kumuh yang didasarkan atas kebijakan nasional sampai ke pada Kab. Polewali Mandar, prasarana pendukung lingkungan permukiman sampai kepada penerapan konsep dan model penanganan permukiman kumuh baik secara nasional maupun pada tingkat Kab. Polewali Mandar, serta mengkaji sejauh mana perubahan, pengaruh dan manfaat yang diterima dan didapat setelah adanya peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui dan melihat sejauh mana kegiatan penanganan permukiman kumuh terlaksana berdasarkan identifikasi tingkat kekumuhan dan sebelum adanya penanganan, apakah kegiatan tersebut membawa hasil dan manfaat yang baik serta sesuai dengan arahan tujuan dan sasaran yang diinginkan dicapai.

2. Lapangan.

Penulis langsung turun ke lapangan dengan cara :

a) Observasi langsung.

Adalah peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung dilokasi yang menjadi tempat penelitian atau yang menjadi obyek penelitian. Dengan melihat kondisi penataan prasaran lingkungan permukiman secara langsung yang terdokumentasikan melalui media potographis. Dalam metode observasi ini dilakukan secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu pada Kelurahan Takatidung Kawasan Mangeramba, untuk mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan penanganan permukiman kumuh. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui perbandingan data sekunder yang sudah diperoleh dengan data eksisting di lapangan. Observasi dilakukan untuk mengenali pola guna lahan serta sebaran prasarana lingkungan permukiman, yaitu kondisi permukiman penduduk, jalan, drainase, persampahan, air limbah, air bersih, proteksi kebakaran dan ruang terbuka hijau.

b) Wawancara.

Adalah peneliti mengadakan wawancara kepada informan. Yang terdiri atas unsur rumah tangga, masyarakat, lembaga keswadayaan masyarakat, aparat kelurahan, Kecamatan, dinas dan instansi terkait seperti dinas PU dan Bappeda, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan dan efektivitas penataan prasarana lingkungan permukiman kumuh di lokasi studi. Metode wawancara dipergunakan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan dan program pengembangan yang telah terlaksana, agar mendapatkan informasi dan data dalam menunjang penelitian ini. Hal ini

dilakukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan penanganan permukiman kumuh pada Kelurahan Takatidung Kawasan Mangeramba, serta mendapatkan informasi terkait problem dan permasalahan yang akan memicu terkendalanya kegiatan penanganan dan peningkatan kualitas permukiman, tidak lupa pula dalam wawancara ini dihimpun pertanyaan pertanyaan yang mengarah pada sejauh mana keefektifan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman membuahkan hasil, bermanfaat, berpengaruh dan membawa perubahan pada keadaan yang lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

c.) Dokumentasi,

Metode dokumen adalah pengumpulan data melalui sumber-sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan dalam bentuk mempelajari dokumen yang berasal dari dinas/ instansi maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan maksud dari penelitian ini. Studi dokumentasi berkaitan dengan kebutuhan data yang tertulis dan sudah disajikan oleh pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemerintah maupun swasta.

a. Metode Pertanyaan (Questioner)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menyajikan beberapa pertanyaan dalam bentuk tertulis. Pertanyaan ditujukan kepada masyarakat yang bermukim di Lokasi Penelitian.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari satuan-satuan elementer yang mempunyai karakteristik dasar yang sama atau dianggap sama. Karakteristik dasar mana dicerminkan dalam bentuk ukuran-ukuran tertentu. (Yunus, 2010 : 260)

Populasi dalam penelitian ini mengacu dari data Badan Pusat Statistik, dan hasil observasi penelitian dengan melakukan deliniasi lokasi permukiman kumuh di kelurahan Takatidung. Berdasarkan data yang diperoleh didapatkan jumlah populasi pada lokasi penelitian sebesar 162 KK.

Arikunto dalam Riduwan, dkk. (2007:39) mengatakan Sampel adalah bagian dari anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya. Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili dari seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di empat lokasi penelitian. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini diambil secara acak random dengan menggunakan rumus dari Taro Yamane Dalam Riduwan, dkk (2007:44) :

$$n = \frac{N}{N (d)^2 + 1}$$

Dimana:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah KK di setiap lokasi penelitian.

d = Derajat yang ditetapkan (0,1)

Karena jumlah populasi telah diketahui yaitu 361 KK, maka dengan menggunakan persamaan diatas dapat dilakukan perhitungan jumlah sampel sebagai berikut :

$$n = 61 \text{ KK}$$

Berdasarkan hasil perhitungan, maka total sampel yang akan diteliti pada lokasi penelitian yaitu 61 KK.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelolah dan menganalisis data data guna menjawab permasalahan dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam studi dengan pengorganisasian data. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis Pola Program Penanganan Kumuh di Kelurahan Takatidung.

Untuk mengetahui pola program penanganan kumuh di kelurahan takatidung, maka peneliti ini menganalisis data secara kualitatif, yaitu analisis dengan cara menghimpun data secara sistematis kemudian menginterpretasikan dan menganalisisnya. Dalam penelitian ini akan digunakan model Miles & Huberman (1992) yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang dilakukan secara terus menerus sampai tuntas. Adapun proses datanya mencakup :

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses mentransformasi data kasar yang telah ditemukan dilapangan, memfokuskan pada hal hal penting serta

memilih hal hal yang pokok dan merangkumnya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan lebih mudah untuk dilakukan pengumpulan data selanjutnya serta memudahkan untuk mencari data lain jika diperlukan.

b) Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, selanjutnya data disajikan. Penyajian data dapat berupa bagan, hubungan antarkategori, dan uraian singkat kalimat yang disusun secara logis dan sistematis dalam menghafal catatan lapangan yang bias. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teks naratif.

c) Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam metode ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, berbagai hal yang telah ditemukan di lapangan harus telah dipahami yang kemudian dibuat kesimpulan sementara yang bersifat sementara. Kesimpulan sementara tersebut kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan akan berubah bila tidak ditemukan bukti bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data selanjutnya dan apabila ditemukan bukti bukti yang kuat maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

2. Efektifitas program penanganan kumuh di Kelurahan Takatidung Kab. Polewali Mandar ditinjau dari segi infrastruktur ?

Untuk mengetahui efektifitas program penanganan kumuh peneliti menggunakan analisis Kuantitatif Deskriptif dengan menggunakan teknik

scoring. Semakin besar skor, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan atau sudah masuk dalam ruang penentuan proses (*citizen power*), begitupula sebaliknya.

Adapun tahapan yang digunakan dalam analisis scoring ini adalah sebagai berikut :

- a) Menghitung total nilai seluruh responden terhadap beberapa indikator pada setiap tahapan kegiatan dan kemudian di rata-rata. Nilai rata-rata tersebut kemudian dijumlah.
- b) Nilai akhir kemudian dibandingkan dengan tabel scoring, analisis *skala likert* digunakan untuk memperoleh skala ordinal. Teknik pembobotan dengan skala likert dilakukan baik pada quisioner yang disebar maupun pada masing masing data yang akan dianalisis. Data yang terkumpul dilakukan kategorisasi dengan skala likert yaitu Sangat Baik, Baik, Kurang Baik, Tidak Baik, Sangat Tidak Baik. Penentuan kategorisasi dapat dilihat pada table 3 Berikut :

Tabel 3 Penentuan Kategori Tabulasi Silang (*CrossTabulation*)

No	Skala Likert	Persentase (%)	Nilai Bobot
1	Sangat Baik	88.87-100	5
2	Baik	66.67-88.88	4
3	Kurang Baik	44.45-66.66	3
4	Tidak Baik	22.23-44.44	2
5	Sangat Tidak Baik	0.00-22.22	1

Sumber : Soegiono (2005:214)

Bedasarkan table diatas penilaian terhadap program penanganan kawasan kumuh di kelurahan takatidung dengan nilai bobot 5 kategori sangat baik, 4 Kategori baik, 3 kategori kurang baik, 2 kategori tidak baik, 1 kategori sangat tidak baik. Dari hasil analisis skala likert ini dideskriptifkan untuk menilai efektifitas program penanganan kumuh di kelurahan takatidung.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor terendah adalah 1 dan skor tertinggi adalah 5 (*Likert dalam Sudjana, 1986*). Apabila diketahui ada 81 responden, maka skor tertinggi adalah 405, dan skor terendah adalah 81. Untuk mengetahui persentase setiap variabel, maka dilakukan dengan cara perhitungan sebagai berikut :

Contoh untuk variabel besaran penghasilan dalam indikator tingkat pendapatan : Misalnya jawaban responden pada saat kondisi sebelum program penanganan kumuh adalah 5 orang menjawab buruk, 20 orang menjawab kurang, 30 orang menjawab cukup, 35 orang menjawab baik, dan 10 orang menjawab sangat baik, maka dengan mengacu pada Skala Likert dalam Sudjana (1986), perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{\% tiap} \\ \text{variabel} &= \frac{(5 \times 1) + (20 \times 2) + (30 \times 3) + (35 \times 4) + (10 \times 5) - (100 \times \text{Skorrendah})}{(\text{skortertinggi} - \text{skorterendah})} \times 100\% \\ &= \frac{(5) + (40) + (90) + (140) + (50) - (100 \times 1)}{(500 - 100)} \end{aligned}$$

$$\frac{225}{400} \times 100 = 56,25\%$$

Setelah diperoleh persentase 56,25%, maka dengan cara yang sama dihitung variabel yang sama pada saat kondisi sesudah program penanganan kumuh. Hasilnya kemudian dikurangi dengan kondisi sebelum program penanganan kumuh, sehingga persentase yang diperoleh merupakan persentase peningkatan variabel besaran pendapatan (apabila hasilnya +) dan penurunan (apabila hasilnya -) dalam indikator tingkat pendapatan.

- Hasil perhitungan merupakan persentase dari setiap variabel yang menunjukkan rata-rata pilihan responden. Dari setiap variabel dalam indikator yang sama dapat dirata-ratkan untuk memperoleh persentase dari indikator yang dimaksud karena merupakan persentase, maka kemungkinan nilai terendah adalah 0 dan tertinggi adalah 100. Sehingga kondisi dalam setiap variabel maupun indikator adalah sebagai berikut :

Baik : nilai data antara 100 - 66,7

Sedang : nilai data antara 66,6 - 33,3

Rendah : nilai data antara 33,2 – 0

Sedangkan besarnya peningkatan dari kondisi sebelum dengan sesudah program penanganan kumuh, juga merupakan persentase yang pengukuran besar peningkatannya adalah sebagai berikut :

Tinggi : nilai peningkatan antara 100 - 66,7

Sedang : nilai peningkatan antara 66,6 - 33,3

Rendah : nilai peningkatan antara 33,2 - 0

- Kemudian hasil yang diperoleh tersebut ditabulasikan sebagai alat penunjang dalam menyusun analisis akhir yang dimaksud dalam penelitian ini.

G. Variabel Penelitian.

Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif (Sudjana, 1984). Variable yang dipakai dalam proses identifikasi ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variable yang digunakan. Adapun variable yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat dalam table 3.4 sebagai berikut :

Tabel. 4. Variable Penelitian

No	Sasaran	Variabel	Data	Sumber
1.	Menjelaskan pola penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Takatidung Kab. Polewali Mandar ?	Pelaksanaan penanganan menurut UU no 1 Tahun 2011 <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan • Peningkatan 	Program Primer, Sekunder	Kepustakaan Observasi, Dokumentasi, Quisioner
2	Menjelaskan Efektifitas program penanganan kumuh di Kelurahan Takatidung Kab. Polewali Mandar ditinjau dari segi infrastruktur ?	Indikator kumuh menurut permen PU No 2 Tahun 2016 <ul style="list-style-type: none"> • Jalan • Drainase • Air minum • Sanitasi • Persampahan • Kondisi Bangunan • Proteksi Kebakaran 	Primer, Sekunder	Kepustakaan Observasi, Dokumentasi, Quisioner

H. Definisi Operasional Penelitian

Dalam bahasan ini diuraikan mengenai tentang definisi operasional terkait variabel yang diukur dalam penelitian Evaluasi program Penanganan Permukiman kumuh Di Kelurahan Takatidung Kawasan Mangeramba.

Untuk Evaluasi yang dimaksudkan disini adalah diambil dari 2 (dua) pengertian menurut ahli yang digabungkan sesuai dengan kebutuhan dan akan diuji dalam penelitian ini yaitu Arikunto dan Cepi (2008 : 2), bahwa : Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Crawford (2000 : 13), mengartikan penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan.

Berangkat dari tinjauan teori inilah kemudian peneliti menyimpulkan pengertian evaluasi yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, sebagai dasar tesis untuk mengkajinya lebih lanjut yaitu “Evaluasi Program Penanganan Kawasan Kumuh Mangeramba.

Selanjutnya untuk variabel penanganan permukiman definisi operasional mengacu pada konsep dan model penanganan permukiman yang ada dalam UU No. 1 Tahun 2011, yaitu disebutkan dalam Bab VIII pasal 94 sampai pasal 97 bahwa ada 2 (dua) Konsep terkait penanganan yaitu Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman, dengan implementasi kegiatan yang mengarah pada tujuan yang menjadi indikator

pengukuran dalam penelitian ini yaitu pemugaran dan peremajaan prasarana lingkungan dan bangunan permukiman dalam mengurangi tingkat kekumuhan kawasan permukiman di lokasi penelitian.

Berikutnya adalah permukiman kumuh definisi operasional yang dipakai adalah berangkat dari rangkuman dari teori permukiman kumuh yang sudah ada yaitu Sri Kurniahingsi, Khomarudin, Tjuk Kuswartojo hingga definisi yang tertuang dalam UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman. Dimana peneliti menyimpulkan bahwa definisi Permukiman Kumuh yang nantinya dipakai dalam penelitian ini adalah permukiman dengan rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar terletak di Sulawesi Barat dengan luas wilayah sebesar 2.022,30 km². Secara administratif, Kabupaten Polewali Mandar terbagi ke dalam 16 kecamatan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Tubbi Taramanu dengan luas 356,95 km² atau 17,65 persen dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas 21,34 km² atau 1,06 persen. Kecamatan Matangnga merupakan kecamatan terjauh yang berjarak 70,3 km antar pusat kecamatan dari ibukota kabupaten.

1. Aspek Fisik Wilayah

a. Letak Geografis dan Administratif

Kabupaten Polewali Mandar terletak ± 195 km sebelah selatan Mamuju, Ibukota Provinsi Sulawesi Barat atau ± 250 km sebelah utara Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Polewali Mandar terletak pada posisi 3°47,83" LS – 3°32'03,79"LS dan 118 ° 53 ° 57,55"BT – 119 ° 29 ° 33,31"BT
Kabupaten ini dibatasi

Sebelah Utara : Kabupaten Mamasa

Sebelah Timur : Kabupaten Pinrang

Sebelah Selatan: Selat Makassar

Sebelah Barat : Kabupaten Majene

Selama tahun 2015 di Kabupaten Polewali Mandar tercatat sebanyak 133 hari hujan dengan curah hujan sebesar 1.409,3 mm. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan April dan November dengan jumlah hari hujan 18 hari dan curah hujan tertinggi pada bulan April sebanyak 264,8 mm. Sebaliknya, jumlah hari hujan

terendah terjadi pada bulan Juli dan September dengan jumlah hari hujan 2 hari dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli sebanyak 0,1 mm.

Sebelum dinamai Polewali Mandar, daerah ini bernama Kabupaten Polewali Mamasa disingkat Polmas yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka nama Polewali Mamasa pun diganti menjadi Polewali Mandar. Nama Kabupaten ini resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006 setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 Tahun 2005, tanggal 27 Desember 2005 tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

Secara administratif, Kabupaten Polewali Mandar terbagi ke dalam 16 (enam belas) kecamatan yang terdiri atas 144 desa dan 23 kelurahan dengan luas wilayah 2.022,30 Km². Kecamatan Tubbi Taramanu merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah 356,95 Km² atau 17,65 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas 21,34 Km² atau hanya 1,06 persen dari total luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar,2018

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)	Desa	Kelurahan
1	Tinambung	21.34	1.06	7	1
2	Balanipa	37.42	1.85	10	1
3	Limboro	47.55	2.35	10	1
4	Tubbi Taramanu	356.95	17.65	12	1
5	Alu	228.30	11.29	7	1
6	Campalagian	87.84	4.34	17	1
7	Luyo	156.60	7.74	10	1
8	Wonomulyo	72.82	3.60	13	1
9	Mapilli	86.80	4.29	11	1
10	Tapango	125.81	6.22	13	1
11	Matakali	57.62	2.85	6	1
12	Polewali	26.27	1.30	-	9
13	Binuang	123.34	6.10	9	1
14	Anreapi	124.62	6.16	4	1
15	Matangnga	234.92	11.62	6	1
16	Bulo	234.10	11.58	9	-
	Jumlah	2,022.30	100.00	144	23

Sumber Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka 2018

2. Aspek Kependudukan/Demografi

Jumlah penduduk merupakan modal yang potensial dan sangat menguntungkan bila diimbangi dengan peningkatan kualitas yang baik. Namun bila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas justru akan menjadi beban dan kendala dalam kegiatan pembangunan. Istilah kependudukan (population) dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan, meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk.

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2014 berjumlah sekitar 369.761 jiwa. Kemudian pada tahun 2018 jumlah penduduk meningkat menjadi 401.272, jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun rata-rata 1,43%, jumlah tersebut terdiri dari 195.620 jiwa penduduk laki-laki dan 205.652 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan Polewali merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 55.556 jiwa (13,84%), sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Matangnga yaitu 5.070 jiwa (1,26 %).

Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar ini tergolong jumlah penduduk kecil, jika dibandingkan dengan kota kota yang ada di Negara Indonesia, namun melihat Sulawesi Barat merupakan provinsi Baru dan berkembang tidak tertutup kemungkinan urbanisasi ke Kabupaten Polewali Mandar akan semakin meningkat, melihat begitu banyak potensi potensi ekonomi dan pendidikan yang ada di Polewali Mandar.

Tabel 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar Dirinci per Kecamatan Tahun 2014 s/d 2018

No	KECAMATAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tinambung	20,937	21,040	21,145	22,317	22,607
2	Balanipa	24,134	24,253	24,374	24,021	24,333
3	Limboro	17,647	17,735	17,823	16,981	17,202
4	Tubbi Taramanu	16,063	16,144	16,223	18,273	18,511
5	Alu	12,429	12,492	12,553	11,980	12,136
6	Campalagian	50,661	50,911	51,165	52,307	52,988
7	Luyo	24,407	24,526	24,649	26,692	27,039
8	Wonomulyo	42,063	42,273	42,481	45,269	45,858
9	Mapilli	24,713	24,834	24,959	27,220	27,574
10	Tapango	20,502	20,602	20,706	21,492	21,771
11	Matakali	19,857	19,955	20,055	21,310	21,587
12	Polewali	47,966	48,204	48,443	54,843	55,556
13	Binuang	26,934	27,068	27,202	30,504	30,901
14	Anreapi	9,083	9,129	9,173	9,273	9,394
15	Matangnga	4,883	4,910	4,932	5,005	5,070
16	Bulo	7,307	7,344	7,380	8,633	8,745
	Total	369,586	371,420	373,263	396,120	401,272

Sumber: BPS Kab.Polewali Mandar, 2018

b. Kepadatan Penduduk

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Hingga akhir tahun 2018 kepadatan penduduk tercatat sebanyak 198 jiwa/km², dengan luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar ±2022,30 km². Bila memperhatikan data penyebaran penduduk pada tingkat kecamatan, ternyata Kecamatan Polewali merupakan wilayah yang memiliki kepadatan tertinggi yaitu 2.115 jiwa/km², kemudian

Tinambung 1.059 jiwa/km² sedangkan Kecamatan Matangnga merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu sebanyak 22 jiwa/km².

Tabel 7 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Luas Area (Km ²)	Kepadatan Penduduk
Tinambung	22 607	21,34	1 059
Balanipa	24 333	37,42	650
Limboro	17 202	47,55	362
Tubbi Taramanu	18 511	356,95	52
Alu	12 136	228,3	53
Campalagian	52 988	87,84	603
Luyo	27 039	156,6	173
Wonomulyo	45 858	72,82	630
Mapilli	27 574	91,75	301
Tapango	21 771	125,81	173
Matakali	21 587	57,62	375
Polewali	61.087	26,27	2 325
Binuang	30 901	123,34	251
Anreapi	9 394	124,62	75
Matangnga	5 070	234,92	22
Bulo	8 745	229,15	38
Polewali Mandar	401.272	2.022,30	198

Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar 2018

3. Aspek Ekonomi

Kondisi ekonomi Kabupaten Polewali Mandar dapat dideskripsikan antara lain dengan mengamati perkembangan PDRB, struktur Perekonomian, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, dan Peranan Sektoral dalam Pembentukan PDRB. Pembangunan perekonomian di Kabupaten Polewali Mandar selama periode lima tahun terakhir (2014-2018), telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal tersebut tercermin dari hasil perhitungan atau penyusunan PDRB daerah ini.

PDRB merupakan salahsatu indikator untuk mengetahui keadaan ekonomi suatu daerah dalam satu periode tertentu. PDRB dihitung Atas Dasar Harga (ADH)

berlaku atau nominal dan PDRB ADH konstan atau riil. PDRB ADH berlaku digunakan untuk mengetahui perkembangan struktur ekonomi, sementara PDRB ADH konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018, nilai PDRB ADH berlaku telah mencapai Rp.3.899,83 milyar , sedangkan pada tahun 2017, nilainya baru mencapai Rp.3.354,23 milyar , nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2018 telah mencapai Rp.1.567,12 milyar sedangkan pada tahun sebelumnya baru mencapai Rp.1.428,75 milyar.

PDRB Kabupaten Polewali Mandar atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan senantiasa mengalami peningkatan, perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan nilai produksi dari barang dan jasa seluruh sektor ekonomi di daerah, juga karena adanya inflasi/deflasi dari harga-harga output produksi tersebut.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari jumlah jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 menunjukkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 10,55 persen dan laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 5,41 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2018

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian	3.05	5.10	2,42	12,17	7,40
2	Pertambangan dan Penggalian	6.98	26.92	14,13	9,96	21,66
3	Industri Pengolahan	7.31	14.43	5,80	8,45	12,25
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	4.10	19.53	15,70	22,09	29,68
5	Bangunan	9.63	41.77	43,17	20,09	13,03
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	8.69	5.63	3.27	5,64	14,30
7	Angkutan & Komunikasi	10.35	17.23	8.89	8,68	12,95
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	28.47	14.42	14,30	19,21	3,01
9	Jasa-jasa	7.03	10.68	9.91	8,23	10,22
	PDRB	6.41	7.65	5,41	10,55	9,68

Sumber: BPS Kab.Polewali Mandar, 2018

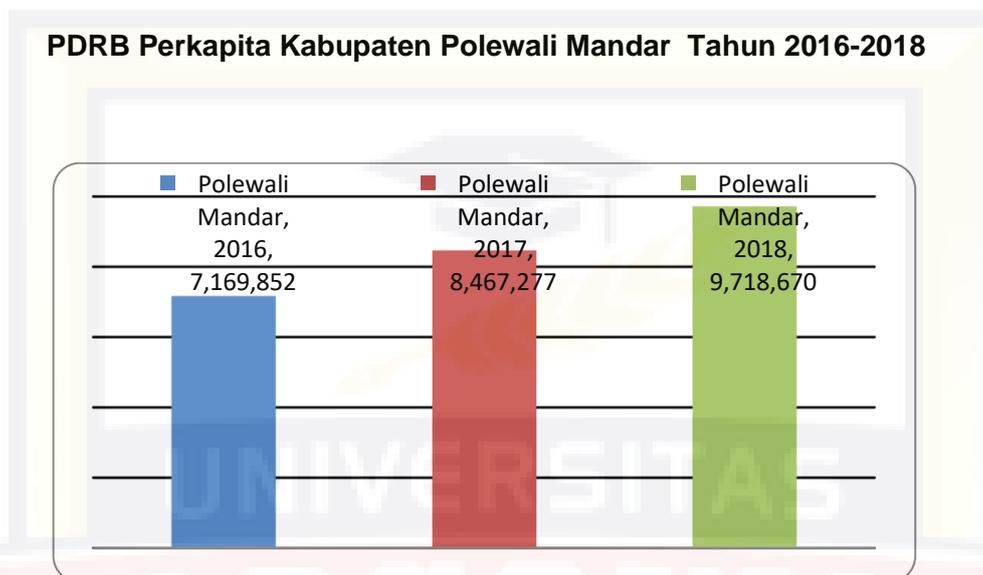
Laju Pertumbuhan masing-masing sektor selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa ada beberapa sektor yang pertumbuhannya relatif stabil, yakni sektor pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air bersih, bangunan, Keuangan, angkutan serta sektor jasa-jasa.

b. Pendapatan Per Kapita

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari besarnya PDRB per kapita atau biasa disebut pendapatan perkapita. Indikator ini sekaligus menunjukkan tingkat kemampuan rata-rata penduduk dalam menyediakan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar telah meningkatkan pendapatan per kapita penduduk sampai pada tahun 2018 telah mencapai Rp.9.718.670, angka jauh meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai Rp. 7.169.852..

Peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2009-2010 dengan persentase kenaikan sebesar 18,09 persen, memasuki tahun 2016-2018 naik sebesar 14,78 persen.

Gambar 3



Sumber: BPS Kab.Polewali Mandar, 2018

c. Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, artinya bahwa rancangan peraturan daerah tentang APBD harus diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat (publik) dan bukan membebani masyarakat.

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan Daerah menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas: a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. APBD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014-2018 dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Jumlah perusahaan yang memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) selama tahun 2017 sebanyak 158 perusahaan perdagangan kecil, 5 perdagangan menengah dan 3 perdagangan besar. Jumlah ini meningkat sebesar 12,86% dibanding tahun 2003 yang hanya sejumlah 140 perusahaan. Sedangkan jumlah perusahaan yang memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (sesuai dengan UU No.3 Tahun 1982) selama tahun 2017 terdapat 253 perusahaan. Jumlah ini meningkat sekitar 24,02% dibanding tahun sebelumnya yang hanya 204 perusahaan.

Adapun jumlah koperasi pada tahun 2017 sebanyak 161 unit yang terdiri dari 18 unit koperasi KUD dan 143 unit koperasi non KUD.

Tabel 9
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2014-2018

No	Anggaran	2014	2015	2016	2017	2018
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
A Pendapatan						
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	26,351,638,100	24,870,082,414	26,155,987,315	32,747,081,780	32,003,063,780
2	Dana Perimbangan (Transfer)	423,665,639,700	434,117,546,484	426,726,476,494	493,471,335,408	585,952,347,509
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	14,293,500,000	25,327,647,481	98,586,996,721	166,275,700,805	83,059,900,540
	Jumlah Pendapatan	464,310,777,800	484,315,276,379	551,469,460,530	692,494,117,993	701,015,311,829
B Belanja						
1	Belanja Tidak langsung	280,677,602,595	296,961,805,220	350,573,485,330	408,209,691,810	457,611,992,536
2	Belanja langsung	200,912,235,281	193,433,107,504	227,297,708,544	315,068,985,572	267,024,010,293
	Jumlah Belanja	481,589,837,877	490,394,912,724	577,871,193,874	723,278,677,382	724,636,002,829
	Surplus/Defisit Anggaran	(17,279,060,077)	(6,079,636,345)	(26,401,733,344)	(30,784,559,389)	(23,620,691,000)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah dan Perizinan 2018.

4. Aspek Sosial/Kebudayaan

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan SDM adalah melalui pendidikan dengan mencanangkan program tuntas belajar 12 tahun, dan membuka akses yang semakin luas agar pemerataan pendidikan dapat diwujudkan. Program ini diharapkan akan mempercepat

terciptanya kualitas sumber daya manusia yang siap bersaing dalam era globalisasi. Keadaan pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar meliputi jumlah sekolah, murid dan guru, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), sampai Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) adalah sebagai berikut : sebanyak 88 sekolah TK menampung 4.112 murid, dengan jumlah guru sebanyak 316 orang. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD) terdapat 315 SD, dan MI sebanyak 64 sekolah yang menampung 58.492 murid, dan diasuh oleh 3.919 guru. Jumlah SMP/ sederajat adalah 56 SMP Negeri, 3 SMP Swasta, 7 SMP Terbuka dan 29 MTs yang menampung sebanyak 21.503 siswa dan diasuh oleh 1.827 guru. Jumlah SMA/ sederajat adalah 13 Sekolah SMA Negeri, SMK sebanyak 20 sekolah, Madrasah Aliyah (MA) 7 sekolah yang menampung sebanyak 10.507 siswa dan diasuh oleh 1.110 guru, serta terdapat 4 perguruan tinggi swasta yakni Unasman, STAI DDI, STIKES Bina Generasi, dan STIKES YPPP Wonomulyo. Keadaan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.18 berikut:

b. Sosial masyarakat

Beragamnya agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Polewali Mandar menggambarkan terjalinnya toleransi antar umat beragama. Penduduk Kabupaten Polewali Mandar menganut berbagai keyakinan dan hidup berdampingan secara damai. Agama islam merupakan agama yang dominan dianut oleh penduduk Polewali Mandar dengan presentase 87,38 % pada tahun 2017.

Terdapat sarana ibadah sebagai sarana yang menunjang dalam kehidupan beragama, sejalan dengan banyaknya penganut agama islam, jumlah mesjid dan mushallah dapat dijumpai pada setiap desa di Kabupaten Polewali Mandar. Berikut jumlah pemeluk agama per kecamatan dan sarana ibadah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10
Jumlah Penduduk Menurut Agama
Di Kabupaten Polewali Mandar

NO	KECAMATAN	ISLAM	PROTESTAN	KATOLIK	HINDU	BUDHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tinambung	23.375	-	-	-	-
2	Balanipa	25.662	-	-	-	-
3	Limboro	16.862	-	-	-	-
4	Tutar	16.223	-	-	-	-
5	Alu	11.924	-	-	-	-
6	Campalagian	56.804	-	-	-	-
7	Luyo	25.000	-	-	-	-
8	Wonomulyo	44.859	1.903	294	-	-
9	Mapilli	24.741	-	-	-	-
10	Tapango	20.973	235	176	-	-
11	Matakali	19.254	1.570	11	4	-
12	Polewali	45.073	4.901	2.956	-	-
13	Binuang	36.865	775	448	-	-
14	Anreapi	7.359	1.130	213	-	-
15	Matangnga	4.873	168	115	-	-
16	Bulo	-	-	-	-	-
	Jumlah	379.847	10.682	4.202	-	-

Catatan : Kec. Bulo masih tercatat pada Kecamatan induknya yaitu Kecamatan Mapilli

Sumber : Polewali Mandar dalam Angka, 2018

3.1. Baseline Data Kumuh Serta SK Penetapan Lokasi Kumuh

Sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, meliputi 4 (empat) kawasan perkotaan dari 6 (enam) sebaran kawasan perkotaan sesuai dengan hierarki sistem perkotaan dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Polewali Mandar. Keempat lokasi sebaran kawasan perumahan kumuh dan permukiman tersebut masing-masing sebagai berikut:

1. Kawasan perkotaan Polewali di Kecamatan Polewali

- ♦ Kawasan perkotaan Polewali di dalam RTRWN ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- ♦ Kawasan perkotaan Polewali merupakan ibukota kabupaten Polewali Mandar;
- ♦ Kawasan perkotaan Polewali merupakan tempat pemusatan sarana pemerintahan, sosial, budaya, dan ekonomi skala kabupaten;
- ♦ Di kawasan perkotaan Polewali tersebut terdapat 10 (sepuluh) spot kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

2. Kawasan perkotaan Sidodadi di Kecamatan Wonomulyo

- ♦ Kawasan perkotaan Sidodadi di Kecamatan Wonomulyo ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- ♦ Kawasan perkotaan Sidodadi merupakan ibukota Kecamatan Wonomulyo;
- ♦ Kawasan perkotaan Sidodadi merupakan tempat pemusatan sarana pemerintahan, sosial, budaya, dan ekonomi skala Kecamatan Wonomulyo;
- ♦ Di kawasan perkotaan Sidodadi terdapat 8 (delapan) spot kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

3. Kawasan perkotaan Pappang di Kecamatan Campalagian

- ♦ Kawasan perkotaan Pappang di Kecamatan Campalagian ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
- ♦ Kawasan perkotaan Pappang merupakan ibukota Kecamatan Campalagian;

- ♦ Kawasan perkotaan Pappang merupakan tempat pemusatan sarana pemerintahan, sosial, budaya, dan ekonomi skala Kecamatan Campalagian;
- ♦ Di kawasan perkotaan Pappang terdapat 5 (lima) spot kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

4. Kawasan perkotaan Tinambung di Kecamatan Tinambung

- ♦ Kawasan perkotaan Tinambung di Kecamatan Tinambung ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
- ♦ Kawasan perkotaan Tinambung merupakan ibukota Kecamatan Tinambung;
- ♦ Kawasan perkotaan Tinambung merupakan tempat pemusatan sarana pemerintahan, sosial, budaya, dan ekonomi skala Kecamatan Tinambung;
- ♦ Di kawasan perkotaan Tinambung terdapat 6 (enam) spot kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

Selengkapnya mengenai sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014 terlihat pada tabel IV.12. berikut ini

Tabel 11
Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Polewali Mandar
Berdasarkan SK. Bupati No. KPTS/050.13/357/HUK Tanggal 15 Juli 2014

No.	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Admistratif			Koordinat Lintang & Bujur	Tingkat Kekumuhan	Jumlah Rumah Tangga	Legalitas Lahan
			RTR/RW/Dusun	Kel./Desa	Kec				
1.	Kawasan Dusun 2 Sepabatu	3,40	Dusun 2	Sepa Batu	Tinambung	3° 30' 23,3172" LS & 119° 1' 3,7596" BT	Sedang	84 KK	Legal
2.	Kawasan Dusun Kandeapi Tinambung	2,23	Dusun Kandeapi	Tinambung	Tinambung	3° 30' 11,2788" LS & 119° 1' 7,7332" BT	Sedang	72 KK	Tidak Legal
3.	Kawasan Dusun Sepang Tinambung	2,20	Dusun Sepang	Tinambung	Tinambung	3° 30' 16,7292" LS & 119° 1' 13,3428" BT	Sedang	162 KK	Tidak Legal
4.	Kawasan Dusun Ga'de Tangngatangnga	0,90	Dusun Ga'de	Tangngatangnga	Tinambung	3° 30' 55,4364" LS & 119° 1' 25,7988" BT	Sedang	74 KK	Tidak Legal
5.	Kawasan Dusun Manjopai Karama	1,48	Dusun Manjopai	Karama	Tinambung	3° 30' 45,4068" LS & 119° 1' 2,3939" BT	Sedang	116 KK	Tidak Legal
6.	Kawasan Dusun Karama	1,80	Dusun Karama	Karama	Tinambung	3° 30' 55,1124" LS & 119° 2' 9692" BT	Sedang	135 KK	Tidak Legal
7.	Kawasan Dusun Ujung Timur	2,85	Dusun Ujung	Pappang	Campalagian	3° 29' 8,0556" LS &	Berat	170 KK	Legal

	Pappang		Timur			119° 8'43,3932" BT			
8.	Kawasan Dusun Kappungbaru	2,01	Dusun	Pappang	Campalagian	3° 29' 20,5548" LS &	Berat	45 KK	Legal
	Pappang		Kappungbaru			119° 8' 28,554" BT			
9.	Kawasan Dusun 5 Pasar Baru Bonde	1,09	Dusun 5 Pasar	Bonde	Campalagian	3° 28' 33,492" LS &	Berat	44 KK	Legal
			Baru			119° 8' 22,146" BT			
10.	Kawasan Dusun Ujung Baru	1,99	Dusun Ujung	Kenje	Campalagian	3° 29' 15,774" LS &	Berat	119 KK	Legal
			Baru			119° 8' 3868" BT			
11.	Kawasan Dusun Babbatoa Lapeo	3,80	Dusun Babbatoa	Lapeo	Campalagian	3° 29' 28,2552" LS &	Berat	168 KK	Legal
			Lapeo			119° 8' 1,3856" BT			
12.	Kawasn Lingkungan I Sidodadi	0,74	Lingkungan I	Sidodadi	Wonomulyo	3° 24' 3,096" LS &	Berat	33 KK	Legal
						119° 12' 44,2332" BT			
13.	Kawasan Lingkungan II Sidodadi	0,62	Lingkungan II	Sidodadi	Wonomulyo	3° 23' 39,246" LS &	Berat	24 KK	Legal
						119° 12' 53,5896" BT			
14.	Kawasan Lingkungan III Sidodadi	1,61	Lingkungan III	Sidodadi	Wonomulyo	3° 24' 15,516" LS &	Berat	65 KK	Legal
						119° 12' 34,3008" BT			
15.	Kawasan Lingkungan V Sidodadi	0,74	Lingkungan V	Sidodadi	Wonomulyo	3° 23' 49,8804" LS &	Berat	42 KK	Legal

16.	Kawasan Dusun IV Siderejo	0,86	Lingkyngan IV	Sidorejo	Wonomulyo	119° 12' 29,4048" BT 3° 23' 38,052" LS &	Sedang	51 KK	Legal
17.	Kawasan Dusun IV Banuabaru	0,49	Lingiungan IV	Sidorejo	Wonomulyo	119° 12' 41,472" BT 3° 23' 42,2196" LS &	Berat	32 KK	Legal
18.	Kawasan Dusun I Sugihwaras	0,60	Dusun I	Sugihwaras	Wonomulyo	119° 12' 24,264" BT 3° 23' 40,8444" LS &	Sedang	54 KK	Legal
19.	Kawasan Dusun IV Sugihwaras	1,27	Dusun IV	Sugihwaras	Wonomulyo	119° 122' 41,472" BT 3° 23' 27,0852" LS &	Berat	56 KK	Legal
20.	Kawasan Dusun Binangaliu Manding	2,79	Dusun Binangalui	Manding	Polewali	119° 12' 44,982" BT 3° 25' 30,4356" LS &	Sedang	108 KK	Legal
21.	Kawasan Lingkungan Manding	1,95	Lingkungan Manding	Manding	Polewali	119° 18' 9,1548" BT 3° 24' 46,5156" LS &	Sedang	93 KK	Legal
22.	Kawasan Kappungbaru Manding	1,36	Lingkungan Kappungbaru	Manding	Polewali	119° 18' 13,5396 BT 3° 24' 41,3136" LS &	Sedang	33 KK	Tidak Legal
23.	Kawasan Lingkungan Takatidung	0,66	Lingkungan Takatidung	Takatidung	Polewali	119° 17' 54,4956" BT 3° 25' 56,4132" LS &	Sedang	86 KK	Tidak Legal
						119° 19' 37,1748" BT			

24.	Kawasan Lingkungan Mangaramba Takatidung	1,62	Lingkungan Mangaramba	Takatidung	Polewali	3° 25' 52,7988" LS & 119° 19' 30,9216" BT	Sedang	162 KK	Tidak Legal
25.	Kawasan Lantora I	0,51	Lingkungan Lantora I	Lantora	Polewali	3° 25' 40,6596" LS & 119° 20' 10,1832" BT	Berat	50 KK	Legal
26.	Kawasan Lantora II	0,69	Lingkungan Lantora II	Lantora	Polewali	3° 25' 54,7248" LS & 119° 20' 9,4848" BT	Berat	60 KK	Legal
27.	Kawasan Lantora III	0,55	Lingkungan Lantora III	Lantora	Polewali	3° 25' 52,1364" LS & 119° 20' 8,1267" BT	Berat	42 KK	Legal
28.	Kawasan Lantoran IV	0,28	Lingkungan Lantora IV	Lantora	Polewali	3° 25' 50,6568" LS & 119° 20' 3,894" BT	Berat	45 KK	Legal
29.	Kawasan Lingkungan Pasar Baru Wattang	0,67	Lingkungan Pasar Baru Wattang	Wattang	Polewali	3° 25' 56,8164" LS & 119° 20' 28,9392" BT	Berat	120 KK	Legal

B. Gambaran Umum Wilayah Penelitian Kawasan Permukiman Kumuh Mangereamba Kelurahan Takatidung

1. Wilayah Administrasi

Wilayah Lingkungan Mangeramba Kelurahan Takatidung berbatasan dengan :

Sebelah utara : Lingkungan Galung Latea

Sebelah selatan : Selat Makassar

Sebelah timur : Lingkungan Takatidung

Sebelah barat : Lingkungan Alli-alli

Batas Koordinat Lingkungan Mangeramba Kelurahan Takatidung adalah :
119° 18' 45" - 119° 20' 15" BT 3° 24' 30" – 3° 26' 15" LS.

Lingkungan Mangeramba Kelurahan Takatidung terletak di dataran rendah dengan ketinggian ± 2 meter di atas permukaan laut dan beriklim tropis.

a. Penggunaan Lahan

Tata guna lahan merupakan suatu bentuk penggunaan lahan di suatu daerah. Secara umum, tata guna lahan dibagi menjadi 2, yaitu: Terbangun, adalah lahan yang sudah dimanfaatkan dengan pendirian bangunan berupa perumahan, jalan, dan bangunan sarana seperti sarana perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, dan lain-lain; Tidak terbangun, adalah lahan yang tidak dimanfaatkan dengan pendirian bangunan, yaitu tambak, ruang terbuka hijau.

- Potensi Lahan

Sebagaimana kondisi geologi di Lingkungan Mangeramba kelurahan Takatidung, berdasarkan data base line Program KOTAKU tahun 2015, rata2 masyarakat kelurahan Takatidung mayoritas bermata pencaharian sebagai Nelayan, karena letak lahan lingkungan mangeramba berada dipesisir pantai Selat Makassar

- Permasalahan Tata Guna Lahan

Masyarakat Kelurahan Takatidung, masih saja di sisakan masalah tata guna lahan. Ini tidak lain di Kelurahan Takatidung hampir rata2 penduduk/warganya tinggal dan bermukim di sepanjang garis sempadan laut dan sungai, dan kondisi bangunan hunian satu dengan lainnya tidak teratur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Permasalahan Tata Guna Lahan di Kelurahan Takatidung diantaranya adalah: Bangunan hunian yang tidak menghadap keakses jalan, atau menghadap keakses jalan namun lebar jalannya tidak sesuai dengan SPM atau ($a \leq 1.5$ m).

b. Kondisi Sosial Ekonomi Wilayah

- Pekerjaan Mayoritas Warga

Dapat dilihat bahwa penduduk di Lingkungan Mangeramba kelurahan Takatidung sebagian besar penduduknya bekerja sebagai Nelayan, sejumlah 320 jiwa. Dan secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan

bahwa mata pencaharian penduduk mayoritas di Lingkungan Mangeramba kelurahan Takatidung adalah perikanan

- Potensi Ekonomi

sektor perikanan/nelayan yang jauh lebih menunjang kegiatan perekonomian selain perikanan laut adalah perikanan air tawar dan perikanan tambak, yang ada di sepanjang pantai yang landai di Kelurahan ini.

Hasil dari produksi pertanian yakni padi langsung di jual kepada tengkulak. sedangkan perikanan laut, tawar, dan tambak, langsung di datang oleh pembeli sekalipun terkadang di pasarkan langsung kepasar-pasar terdekat di luar wilayah kelurahan tersebut.

Sementara Potensi Ekonomi yang jauh lebih besar menambah pendapatan sebagian penduduk warga di Kelurahan Takatidung khususnya pada sektor Perikanan/nelayan adalah Budidaya Rumput Laut.

Hampir dari setengah jumlah Penduduk yang bermukim di sepanjang pantai di Kelurahan Takatidung, menekuni usaha budidaya rumput laut ini.

Selain dari pada sektor perikanan/nelayan, sektor pertanian/peternakan khususnya bidang Peternakan merupakan salah satu Potensi ekonomi di Kelurahan ini sekalipun masih saja terdiri dari satu, dua kelompok namun cukup untuk menambah pendapatan warga penduduk di Kelurahan Takatidung.

- Masalah Ekonomi

masalah perekonomian yang tidak sedikit menyita perhatian warga masyarakat Lingkungan Mangeramba kelurahan Takatidung adalah Kelompok budidaya/usaha rumput laut yang di mana lebih setengah dari jumlah penduduk yang bermukim sepanjang pantai pesisir kelurahan menekuni pekerjaan/profesi ini. Budidaya rumput laut tentunya memiliki prospek dan potensi ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja baru, namun masyarakat Lingkungan Mangeramba kelurahan Takatidung di perhadapkan pada kondisi aspek Perbankan dan aspek sumber daya manusia (SDM). Aspek Perbankan tentunya Modal awal dan aspek SDM adalah dalam bentuk bantuan Pelatihan kewirausahaan dari Pemerintah. sehingga tentunya hasil dari usaha budidaya rumput laut, selain dijual mentah kepada tengkulak, namun juga bisa diolah dalam bentuk adonan/Kue dll. Dari pernyataan salah satu informan kelompok budidaya rumput laut kelurahan Takatidung yang banyak mengeluhkan dua hal tersebut di atas.

Potensi Sosial

Masyarakat Lingkungan Mangeramba Kelurahan Takatidung merupakan masyarakat yang secara turun temurun mendiami rumah di lingkungan mereka masing-masing. Dalam perkembangannya , tidak sedikit pendatang yang ikut bertempat tinggal di Kelurahan ini. Hal ini biasanya dikarenakan hubungan kekeluargaan dengan masyarakat asli maupun karena faktor lokasi pekerjaan. Di sisi lain tidak sedikit pula warga Takatidung yang meninggalkan kampung

halamannya demi mencari penghidupan yang lebih baik. Dan tidak sedikit dari mereka yang berhasil dengan merantau di kota-kota besar di Indonesia.

Masyarakat Lingkungan Mangeramba Kelurahan Takatidung dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai Perdagangan/jasa dan Perikanan/nelayan. Kelebihan atau keunikan yang mereka miliki, yang saat ini sangat sulit ditemukan terutama di perkotaan adalah jiwa sosial yang sangat tinggi.

Antusiasme dalam mengikuti setiap kegiatan yang diadakan berbagai pihak untuk kemajuan Kelurahan dengan sukarela mereka hadiri. Jiwa gotong royong dan semangat saling membantu terhadap tetangga maupun warga lainnya ditunjukkan dengan keikutsertaan mereka secara sukarela ketika ada yang membutuhkan, ada yang memiliki hajat hingga pembangunan-pembangunan sarana umum, mereka dengan ikhlas menyumbangkan pikiran, tenaga, bahkan harta untuk memajukan Kelurahan. Meski tidak ada kegiatan budaya khusus tapi jiwa gotog royong dan semangat kebersamaan menjadi modal dan potensi yang bisa memajukan Lingkungan Mangeramba Kelurahan Takatidung ke depannya.

Permasalahan Sosial

sejumlah persoalan, antara lain adalah masih tingginya persentase jumlah Kepala Rumah Tangga/MBR persentase jumlah Kepala Rumah Tangga/MBR pada tahun 2015 adalah 71,31%.

Hal ini disebabkan pertumbuhan dan pembangunan wilayah tidak mampu mengatasi terjadinya kesenjangan pendapatan antara masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan yang berpenghasilan tinggi. (Non MBR).

Masyarakat berpenghasilan rendah sangat sulit memperoleh rumah yang layak huni dan terjangkau, sehingga salah satu masalah terbesar penataan Permukiman

Kelurahan Takatidung adalah penataan pemukiman padat. Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan sekaligus juga melambangkan tingkat kesejahteraan penghuninya.

Bagi orang-orang yang berpenghasilan besar, mereka dapat membangun rumah bertingkat yang besar dan nyaman, memiliki halaman luas dan asri dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap serta memadai. Tetapi orang-orang miskin hanya mampu memiliki rumah yang bersifat sementara dan sangat jelek baik struktur maupun infrastruktur yang ada.

Rumah-rumah dibangun seadanya saja sekedar bisa berlindung dari panas dan hujan maupun dinginnya udara di malam hari, karena lahan yang ditempati bukan milik sendiri tetapi diperoleh secara ilegal.

Penghuni pemukiman kumuh ini harus puas tinggal di rumah petak atau gubuk reyot yang saling berhimpitan, dikelilingi saluran air mampet dan sampah disepanjang jalan setapak dan lorong-lorong sempit, dengan ruangan kecil di sepanjang pantai Kelurahan ini.

C. Kondisi Prasarana-Sarana Dasar Lingkungan 7 Indikator Kumuh

1. Jalan

Jalan merupakan sarana transportasi yang dapat mendukung perekonomian. Karakteristik jaringan jalan yang ada di Kelurahan Takatidung terdiri dari jalan aspal, rabat beton dan jalan tanah.

Jalan dengan kualitas aspal yang menghubungkan kelurahan satu dengan kelurahan lainnya di Kelurahan Takatidung kondisinya masih sangat baik dan sebagian sudah dilengkapi oleh fasilitas pelengkap yaitu lampu jalan. Jalan

lingkungan dengan jenis kualitas rabat beton hampir rata2 kondisinya juga masih sangat baik.

Namun kondisi jalan yang ada di wilayah kawasan permukiman kumuh di kelurahan Takatidung. selain jalan tanah dan rabat beton juga masih sangat di bawah standar pelayanan minimum (SPM), yaitu panjang jalan dengan lebar <1.5 m. sekalipun sepanjang jalan rabat beton setengahnya kondisinya masih baik dan setengah lagi kondisi rusak berat. Secara rinci permasalahan jalan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 12 permasalahan Jalan

No	Lingkungan	Panjang Jalan	Pjng Jalan lebarnya a> 1,5 m	% Pjng Jalan lebarnya a> 1,5 m	Pjng Jalan lebarnya a> 1,5 m & Rusak	% Pjng Jalan lebarnya > 1,5 m & Rusak	Jalan tdk punya saluran samping
1	Kamp. Pajala	2.616	1.026	39%	152	15%	1.590
2	Takatidung	2.050	1.300	63%	150	12%	980
3	Mangeramba	1.303	1.303	100%	406.5	46%	406
4	Alli-alli	4.371	4.371	100%	1.410	32%	3.278
5	G. Latea	7.655	7.655	100%	1.280	17%	2.235
	Total	18.245	15.244	84%	2.992	20%	8.771

Sumber :Olah Data Baseline Kelurahan, Tahun 2015

2. Drainase

Jaringan drainase di Kelurahan Takatidung terdapat pada sisi jalan berupa saluran air yang dapat mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan.

Sayangnya sistem drainase ini tidak terkoordinir dengan baik hingga sebagian air yang dialirkan drainase hanya akan menyerap kedalam tanah.

Sistem drainase yang dipakai di kelurahan Takatidung adalah sistem drainase terbuka yang berfungsi hanya sebagai tempat limpahan air hujan dari badan jalan. Sistem drainase yang terbuka membuat banyak sampah terdapat pada saluran drainase,

adapun titik wilayah luas genangan di kelurahan ini terbilang stabil atau luas genangan nol persen (0%).

Secara rinci permasalahan Drainase diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 13 permasalahan Drainase dan Genangan

No	Lingkungan	Panjang Drainase	Panjang drainase Rusak	% Panjang drainase yg Rusak	Luas Genangan	% Genangan
1	Kamp. Pajala	5.412	3.362	62%	0	0%
2	Takatidung	3.112	1.392	65%	0	0%
3	Mangeramba	1.634	327	72%	0	0%
4	Alli-alli	8.842	7.749	88%	0	0%
5	G. Latea	1.917	1.260	66%	0	0%
	Total	21.989	15.451	70%	0	0%

Sumber :Olah Data Baseline Kelurahan, Tahun 2015

3. Sanitasi

Masyarakat di Kelurahan Takatidung, dengan berbagai permasalahan limbah, hampir rata2 bersumber dari limbah rumah tangga masyarakat.

Limbah rumah tangga di kelurahan ini ada yang terhubung langsung dengan jaringan drainase dengan sistim SPAL, perpipaan bahkan hampir sebagian besar penduduk warga kelurahan dengan sistim menyerap langsung kedalam tanah.

Warga Kelurahan Takatidung, yang telah memiliki MCK pribadi sebesar 50% yakni 613 rumah sedangkan sisa menggunakan MCK umum terdekat. Septi tank yang biasa digunakan oleh warga adalah septi tank pribadi. Tetapi beberapa septi tank belum memenuhi standart. Jarak septi tank dengan sumber air bersih (sumur) masih terlalu dekat. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2916-1992 tentang Spesifikasi Sumur Gali untuk Sumber Air Bersih, bahwa jarak horizontal sumur ke arah hulu dari aliran air tanah atau sumber pengotoran (bidang resapan/tangki *septic tank*) lebih dari 11 meter.

Tabel 14 permasalahan Limbah :

No	Lingkungan	Jml RT tidak memiliki Jamban/MCK	% Jml RT tidak memiliki Jamban/MCK	RT tdk memilik ikloset (Leher A') yg t'hubun g dg septik	% RT tdk memiliki kloset (Leher A') yg t'hubun g dg septik	Jml SPAL RT tercampur dg D'nase Lingk.	% JmlSPA L RT tercampur dg D'nase Lingk.
1	Kamp. Pajala	168	75%	210	94%	224	100%
2	Takatidung	110	56%	78	40%	195	100%
3	Mangeramba	132	72%	132	43%	296	100%
4	Alli-alli	95	35%	76	28%	274	100%
5	G. Latea	57	24%	57	24%	238	100%
	Total	614	50%	548	45%	1.227	100%

Sumber :Olah Data Baseline Kelurahan, Tahun 2015

4. Air Minum

Pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat di Kelurahan Takatidung, sebagian kecil terlayani melalui distribusidari PDAM Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan sistem perpipaan, akan tetapi belum sepenuhnya masyarakat dapat menjangkau. Faktor tersebut dipengaruhi oleh kondisi social ekonomi masyarakat, distribusi kemasing-masing unit rumah belum dapat terpenuhi, sehingga sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah dengan penggunaan sumur pompa dan sumur artesis. Guna memaksimalkan pelayanan air minum, maka dapat didistribusikan secara kolektif melalui penyediaan bak penampungan distribusi dan penyediaan hydrant umum, sehingga pada kondisi masyarakat tertentu dapat terlayani secara bersama

Tabel 15 permasalahan Air Mnum

No	Lingkungan	Jml RT tdk terlayani jaringan air bersih	% Jml RT tdk terlayani jaringan air bersih	Jml RT tdk tercukupi kebutuhan minimal 60 liter (MCK)	% Jml RT tdk tercukupi kebutuhan minimal 60 liter (MCK)
1	Kamp. Pajala	160	71%	97	43%
2	Takatidung	41	21%	0	0%
3	Mangeramba	123	53%	123	53%
4	Alli-alli	189	69%	41	15%
5	G. Latea	92	39%	5	2%
	Total	492	40%	143	12%

Sumber :Olah Data Baseline Kelurahan, Tahun 2015

5. Persampahan

Sumber sampah di Kelurahan Takatidung berdasarkan sumbernya meliputi; sampah rumah tangga, sampah jalan dan sebagainya. Jika didasarkan pada sifat dan karakteristik sampah yang dihasilkan oleh berbagai aktifitas di Kelurahan Takatidung terdiri atas jenis sampah basah dan sampah kering.

Hingga saat ini pengelolaan sampah yang dihasilkan belum dikelola secara optimal, pola penanganan yang dilakukan masyarakat masih bersifat konvensional dengan cara; membakar, menimbun, membuang ke laut. Hanya sebagian kecil volume sampah yang telah tertangani dan diangkut ke TPA Kelurahan Takatidung.

Secara rinci permasalahan Sampah diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 16 permasalahan Persampahan

No	Lingkungan	Jml RT tidak memiliki T'sampah	% Jml RT tidak memiliki T'sampah	Jml RT tidak terangkut sampah ke TPS/TPA -2 x seminggu	% RT tidak terangkut sampah ke TPS/TPA -2 x seminggu
1	Kamp. Pajala	202	90%	9	41%
2	Takatidung	181	93%	4	29%
3	Mangeramba	132	56%	132	56%
4	Alli-alli	229	84%	2	4%
5	G. Latea	117	49%	11	9%
	Total	981	80%	70	6%

Sumber :Olah Data Baseline Kelurahan, Tahun 2015

6. Keteraturan Bangunan

Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan sekaligus juga melambangkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Bagi orang-orang yang berpenghasilan besar, mereka dapat membangun rumah bertingkat yang besar dan nyaman, memiliki halaman luas dan asri dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap serta memadai.

Tetapi orang-orang miskin hanya mampu memiliki rumah yang bersifat sementara dan sangat jelek baik struktur maupun infrastruktur yang ada.

Rumah-rumah dibangun seadanya saja sekedar bisa berlindung dari panas dan hujan maupun dinginnya udara di malam hari, karena lahan yang ditempati bukan milik sendiri tetapi diperoleh secara illegal.

Penghuni pemukiman kumuh ini harus puas tinggal dirumah petak atau gubuk reyot yang saling berhimpitan, dikelilingi saluran air mampet dan sampah disepanjang jalan setapak dan lorong –lorong sempit, dengan ruangan kecil di sepanjang pantai Kelurahan Takatidung. Secara rinci Kelayakan Bangunan Hunian penduduk diuraikan pada tabel berikut

Tabel 17 Kondisi Fisik Bangunan

No	Lingkungan	Jml rumah tdk layak	% Jml rumah tidak layak	Jml rumah Luas lantai < 7,2 m ² /org	% rumah Luas lantai < 7,2 m ² /org	Jml Rumah tdk teratur	% Jml Rumah tdk teratur
1	Kamp. Pajala	208	93%	55	25%	195	87%
2	Takatidung	73	47%	38	19%	129	66%
3	Mangeramba	117	49%	93	31%	158	53%
4	Alli-alli	114	42%	39	14%	67	24%
5	G. Latea	48	20%	19	8%	84	35%
	Total	589	48%	244	20%	633	52%

Sumber :Olah Data Baseline Kelurahan, Tahun 2015

Kepadatan Bangunan

Karakteristik perumahan di Kelurahan Takatidung tidak lepas dari bagaimana persebaran rumah penduduk dengan dapat mengikuti acuan dari banyak pola yang ada diantaranya, Pola permukiman memanjang (linear) Perumahan yang tersusun

dengan pola ini biasanya dapat dijumpai di sepanjang jalan, sepanjang sungai, dan sepanjang garis pantai.

Bentuknya memanjang mengikuti bentuk jalan, sungai, atau garis pantai, pola permukiman memusat terpusat biasanya masih memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan pekerjaan, sehingga pola ini akan membantu mereka untuk saling berkomunikasi dengan mudah. Penduduk di kelurahan Takatidung.

Mendirikan rumah sebagai tempat tinggal mereka dengan memakai pola linier mengikuti peredaran jalan yang ada, dan pola permukiman memusat/terpusat.

Luas wilayah Kelurahan Takatidung yang kurang lebih 3.84 km². Dengan jumlah kepala rumah tangga 1227, dan jumlah kepala keluarga/KK, dengan pola permukiman memusat, sangat jelas bahwa kelurahan Takatidung tergolong sebagai kelurahan/wilayah padat permukiman, dan wilayah yang padat permukiman ini terpusat pada kawasan kumuh di kelurahan Takatidung. Secara rinci tingkat kepadatan Bangunan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 18 Kepadatan bangunan

No	Lingkungan	Jml	Luas	Kepadatan
		Bangunan	Permukiman (Ha)	bangunan (unit/Ha)
1	Kamp. Pajala	293	5.0	80.60
2	Takatidung	320	9.3	34.41
3	Mangeramba	319	7.6	41.97
4	Alli-alli	403	12.8	22.93
5	G. Latea	321	12.6	25.58
	Total	1.656	47.2	36.00

Sumber :Olah Data Baseline Kelurahan, Tahun 2015

D. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Mangaramba, Kelurahan Takatidung

Kawasan ini memiliki luas 7,0 Ha, dengan jumlah penduduk : 1.695 jiwa.

Dengan tipologi permukiman kumuh di tepi air. Sehingga tipikal permukiman merupakan tipikal bangunan air seperti rumah panggung.

Mangeramba sebagian besar terdiri dari jenis tanah alluvial Hal ini dikarenakan jenis tanah di wilayah Mangeramba sangat subur dan cocok untuk pertanian, karena jenis tanah tersebut terbentuk dari endapan tanah liat bercampur dengan pasir halus, berwarna coklat hitam kelabu dengan daya penahan air yang baik dan banyak mengandung mineral yang baik untuk pertumbuhan tanaman.

Kondisi topografi di Mangeramba berada di Dataran rendah daerah Pesisisir dan mempunyai ketinggian 0-12 (MDPL) meter diatas permukaan laut dan beriklim Tropis.

Masyarakat Mangeramba adalah masyarakat yang sangat kental dengan budaya-budaya lokal secara turun temurun. Diantara budaya lokal tersebut yakni Mappatamma, Maulid Nabi dan acara Rabana. Mappatamma adalah satu jenis budaya warga masyarakat ketika Khatam Al-Qur'an sebagai wujud apresiasi orang tua kepada anaknya, dimana Pujaan hati/anak duduk diatas punggung kuda/Sayyang Pattu'du.

Tabel 19
Pofil Kawasan Permukiman Kumuh Mangaramba Kelurahan Takatidung
Hasil Verifikasi

No.	KRITERIA/INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SATUAN		
A. FISIK						
1.	Keteraturan Bangunan Hunian	Jumlah Keteraturan Bangunan Hunian	207	Unit rumah tangga		
		Persentase Keteraturan Bangunan Hunian	61,06	Persentase		
2.	Kepadatan Bangunan Hunian	Luas PermukimanHa	7,0	Ha		
		Jumlah total bangunanunit	339	Unit		
		Tingkat kepadatan bangunan ...unit/Ha.	48	Unit/Ha		
3.	Kelayakan Bangunan Hunian	Jumlah Bangunan hunian memiliki luas lantai $\geq 7,2$ m ² per orang	222	Unit rumah tangga		
		Persentase Bangunan hunian memiliki luas lantai $\geq 7,2$ m ² per orang	65,5	Persentase		
		Jumlah Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis	222	Unit rumah tangga		
		Persentase Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis	65,5	Persentase		
		4.	Aksesibilitas Lingkungan	Panjang Total jaringan jalan lingkungan yang ada	1.303,51	Meter
				Panjang jalan lingkungan dengan lebar $\geq 1,5$ meter	1.303,51	Meter
Panjang jalan lingkungan dengan lebar $\geq 1,5$ meter yang permukaannya diperkeras	897,25			Meter		
Jangkauan Jaringan jalan lingkungan yang layak	68,83			Persentase		
Panjang jalan lingkungan dengan lebar $\geq 1,5$ meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak	897,25			Meter		
5.	Drainase Lingkungan	Panjang jalan lingkungan dengan lebar $\geq 1,5$ meter yang dilengkapi saluran samping jalan	897,25	Meter		
		Jalan sesuai persyaratan teknis	68,83	Persentase		
		Luas Area permukaan tidak terjadi genangan air/banjir	5,25	Ha		

	Persentase Kawasan permukiman tidak terjadi genangan air/banjir	75	Persentase
	Panjang Total drainase	1.634	Meter
	Panjang Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas tidak rusak/berfungsi baik	1.307	meter
	Persentase Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai.	80	persentase
6.	Pelayanan Air Minum		
	Jumlah masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak)	216	Unit rumah tangga
	Persentase Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak)	63,8	Persentase
	Jumlah Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60 liter/org/hari)	216	Unit rumah tangga
	Persentase Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60 liter/org/hari)	63,8	persentase
7.	Pengelolaan Air Limbah		
	Jumlah masyarakat memiliki akses jamban keluarga/jamban bersama (5 KK/jamban)	207	Unit rumah tangga
	Persentase Masyarakat memiliki akses jamban keluarga/jamban bersama (5 KK/jamban)	61,06	Persentase
	Jumlah Jamban keluarga/Jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic tank)	207	Unit rumah tangga
	Persentase Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic tank)	60,95	Persentase
	Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah	61,06	Persentase

	dengan saluran drainase lingkungan		
8.	Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah domestic rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA minimal dua kali seminggu	207 Unit rumah tangga
		Persentase Sampah domestic rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA minimal dua kali seminggu	61,06 Persentase
9.	Pengamanan Bahaya Kebakaran	Persentase Kawasan permukiman memiliki prasarana/sarana proteksi kebakaran	0 persentase
B NON FISIK			
1.	Legalitas Pendirian Bangunan	Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB	207 unit rumah tangga
		Persentase Bangunan hunian memiliki IMB	61,06 persentase
		Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah	207 unit rumah tangga
		Persentase lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang di akui pemerintah	61,06 persentase
2.	Kepadatan Penduduk	Kepadatan pendudukjiwa/Ha (=Jumlah penduduk dibagi luas wilayah RT)	242 jiwa/Ha
		Jumlah penduduk	1.695 jiwa
		Luas wilayah RT	Ha
3.	Mata Pencaharian Penduduk	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan	rumah tangga
		Perikanan/Nelayan	339
		Pertambangan/Galian	
		Industri/Pabrik	
4.	Penggunaan Daya Listrik	< 450 Watt	132 rumah tangga
		900 Watt	207
		1300 Watt	
		≥ 2200 Watt	
		Menumpang/Tidak punya meteran sendiri/dll.	

5.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit	207	rumah tangga
		Praktek Dokter/Poliklinik		
		Puskesmas/Pustu	132	
		Dukun/Pengobatan tradisional		
		Bidan/Mantri		
6.	Fasilitas Pelayanan Pendidikan	Tidak Pernah		
		Dalam kelurahan/kecamatan yang sama	339	rumah tangga
		Luar kecamatan		
		Di kota lain		
		Tidak sekolah		
		Tidak ada anggota rumah tangga usia wajib belajar		

Sumber : Dokumen RP2KPKP Kab. Polewali Mandar 2015

BOSOWA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

BANTUAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA KAWASAN KUMUH
WILAYAH SULAWESI TAHAP 2

PETA LOKASI KAWASAN KUMUH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
(KAWASAN LINGKUNGAN MANGERAMBA)
KELURAHAN TAKATIDUNG, KECAMATAN POLEWALI

Propetial Sistem Cade Transverse Mercator
 Datum Horizontal Grid UTM Zone 50S
 UTM Zone 50S

SKALA 1 : 4.000

SUMBER DATA :
 - Citra Satelit Bing Map, Tahun 2012
 - Hasil Survei Tahun 2014

CATATAN :
 - Batas Administrasi (Datar Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Menupakan Batas Indikasi

KETERANGAN

Batas Administrasi

- Ibu kota Kabupaten
- Ibu kota Kecamatan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perairan

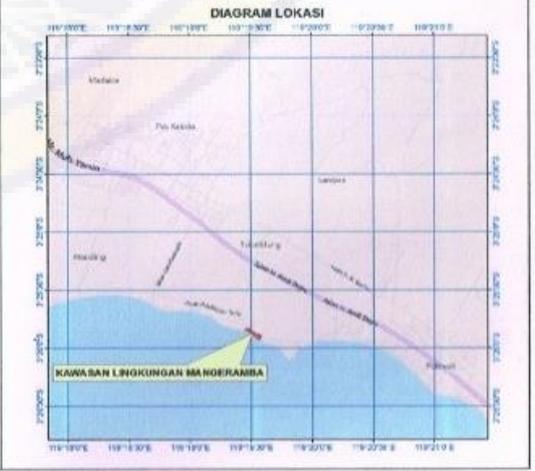
- Danau
- ~ Sungai

Jaringan Perhubungan

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Lokasi Kawasan Kumuh :

- Lokasi Kawasan Kumuh



E. Analisis Pola Penanganan Kumuh

Undang Undang No. 17 Tahun 2007 Dalam Rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) telah mengamanatkan pembangunan dengan target penanganan permukiman kumuh mencapai nol Hektar di tahun 2019, tentu dengan adanya amanat ini akan mendorong stakeholder terkait untuk ikut andil dalam pencapaian target . Amanat itu kemudian lebih rinci dijelaskan dalam undang undang no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan adanya undang undang tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong untuk segera menyusun rencana penanganan dan target penanganan permukiman kumuh, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mencapai target no kumuh di tahun 2019, pemerintah membutuhkan kucuran dana sebesar Dua Ratus Lima Beras Trilliun rupiah untuk mnuntaskan 38.431 ha permukiman kumuh.

Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu kabupaten terdampak kumuh memiliki luasan kumuh sebesar 41.09 Ha, ini menjadi permukiman kumuh terluas di Provinsi Sulawesi Barat, hal itu juga yang mendorong banyaknya penanganan kumuh yang telah dilakukan di Kab. Polewali Mandar baik itu yang bersifat non fisik dan fisik yang sumber pendanaanya berasal dari berbagai pihak, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, dan Program unggulan seperti Program Kota Tanpa Kumuh, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Adapun langkah langkah yang telah dilakukan pemerintah pusat dalam penanganan permukiman kumuh dapat dilihat pada table dibawah ini

**Tabel 20 Detail Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kumuh Non Fisik
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Cipta Karya**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	
		Bulan	Tahun
Pengaturan			
1	Legalisasi Draft RPP tentang Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Apr-Des	2015
2	Legalisasi Rapermen Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh	Apr-Des	2015
3	Pedoman Pembangunan Prasarana dan Sarana dalam Rangka Penanganan Permukiman Kumuh	Feb-Mar	2015
4	Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh	Feb-Mar	2015
5	Pedoman Pengelolaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh	Feb-Mar	2015
6	Pedoman Sistem Informasi Database Permukiman Kumuh	Feb-Mar	2015
7	Penajaman data kawasan	Jan-Des	2015

	kumuh				
8	Penerapan standar dari	Apr-Des	2015		
	Balitbang Kementerian PUPR				
9	Pembangunan Sistem Informasi	Feb-Des	2015		
	Database Permukiman				
	Kumuh				
10	Pembentukan kelembagaan	Feb-Mar	2015		
	penanganan permukiman				
	kumuh				
Pembinaan					
1	Pendampingan penyusunan	Mar-Des	2015		
	Perda peningkatan kualitas				
	permukiman kumuh				
2	Pendampingan penyusunan	Mar-Des	2015		
	RKP Kumuh Perkot aan				
Pengawasan					
1	Pelaksanaan pekerjaan sesuai	Apr-Des	2015		
	dengan NSPK				
2	Pembentukan tim Quality	Feb-Apr	2015		
	Insurance				
3	Penerapan pengawasan	Apr-Des	2015		
	berjenjang				

Sumber : Pedoman Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Dirjen Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015

Tabel diatas menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan upaya penanganan kumuh mulai dari perancangan undang undang, penyusunan pedoman teknis,

pembangunan sistem informasi kumuh hingga pembentukan dan pembinaan tim penanganan serta pengawasan berjenjang. Bias dilihat pemerintah pusat telah menyusun *platform* penanganan kumuh yang harus segera ditindak lanjuti pemerintah daerah.

Di pemerintah tingkat daerah pun sebenarnya telah banyak penanganan kumuh yang telah dilakukan seperti penerbitan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar No. KPTS/050.13/357/HUK Tanggal 15 Juli 2014 tentang lokasi kumuh kabupaten Polewali mandar, yang kemudian menjadi acuan pembagian wewenang penanganan kumuh. Sebelumnya dalam undang undang no 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman kumuh telah membagi wewenang pemerintah dalam mengintervensi pemukiman kumuh sebagai berikut

Tabel 21 Wewenang Penanganan Kumuh Berdasarkan Luasan Kumuh

Pusat	Provinsi	Kab/Kota
Penataan Kualitas	Penataan Kualitas Kawasan	Penataan Kualitas Kawasan
Kawasan Permukiman	Permukiman Kumuh 10 - 15	Permukiman Kumuh < 10
Kumuh > 15 Ha	Ha	Ha

Sumber : Pedoman Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015

Untuk lingkungan Mangeramba sendiri memiliki luas 7.0 Ha namun letak deliniasinya berbatasan langsung dengan deliniasi kumuh lingkungan Takatidung dan Lingkungan Kampung Pajala, hal ini yang membuat pemerintah menggabungkannya menjadi satu kawasan permukiman sehingga memiliki luas lebih dari 15 Ha dan menjadi wewenang penanganan kumuh pemerintah daerah provinsi. Namun dengan komitmen pemerintah daerah kabupaten Polewali yang

tinggi terhadap pengentasan kawasan kumuh membuat pembangunan daerah kabupaten juga memfokuskan ke kawasan deliniasi kumuh sehingga di lingkungan Mangeramba begitu banyak pelaksanaan penanganan kumuh, berdasarkan hasil survey lapangan dan pengambilan data sekunder di pemerintah kelurahan Takatidung, peneliti mencatat ada beberapa pelaksanaan fisik yang berada di kawasan Mangeramba dapat dilihat ditabel dibawah ini.





Tabel 21 Pelaksanaan Kegiatan Fisik Penanganan Kumuh Di Kawasan Mangeramba Kelurahan Takatidung
Tahun 2015-2019

No	Kegiatan	Indikator	Volume	Sumber Pendanaan		Tahun
		Kumuh		Biaya (Rp)	Sumber	
Penanganan Fisik						
1	Normalisasi Saluran	Jalan Lingkungan	250 m	180,000,000.00	Dinas Permukiman Provinsi	2015
2	Normalisasi Saluran	Drainase Lingkungan	270 m	180,000,000.00	Dinas Permukiman Provinsi	2015
3	Tembok Penahan Siring	Jalan Lingkungan	74 m	197,800,000.00	Dinas PUPR Provinsi	2016
4	Pembangunan Drainase	Drainase Lingkungan	115 m	186,000,000.00	Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten	2016

5	Rehab Rumah	Bangunan	40 unit	544,000,000.00	Program BSPS		2016
		Tidak Layak					
		Huni					
6	Motor Sampah	Persampahan	1 unit	32,000,000.00	Dinas Perumahan & Permukiman		2017
		n			Kabupaten		
7	Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpusat (IPAL)	Sanitasi	1 unit	641,300,000.00	Dinas PU dan Penataan Ruang		2017
		Lingkungan			Kabupaten		
8	Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpusat (IPAL)	Sanitasi	3 unit	292,500,000.00	Dinas PU dan Penataan Ruang		2017
		Lingkungan			Kabupaten		
9	Pengerasan Jalan Beton	Jalan	350 m	400,000,000.00	Dinas Perumahan & Permukiman		2018
		Lingkungan			Kabupaten		
10	Motor Sampah	Persampahan	1 unit	32,000,000.00	Dinas Lingkungan	Hidup	2018
		n			Kabupaten		
11	Rehab Rumah	Bangunan	4 unit	54,000,000.00	Program BSPS		2018
		Tidak Layak					

	Huni					
12	Rehab Rumah	Bangunan	1 unit	15,000,000.00	Dinas PUPR Provinsi	2019
	Tidak Layak					
	Huni					
13	Pekerjaan Jalan Beton	Jalan	67 m	184,600,000.00	Dinas PUPR Provinsi	2019
	Lingkungan					
14	Motor Sampah	Persampaha n	1 unit	35,000,000.00	Bank Sulselbar	2019
15	Lampu Penerangan Jalan	Jalan	10 unit	375,113,122.00	Dinas Perumahan & Permukiman Kabupaten	2019
16	Hidran Umum	Air Minum	1 unit	87,000,000.00	Bank BRI Cabang	2019
17	Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpusat (IPAL)	Sanitasi Lingkungan	2 unit	195,000,000.00	Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten	2019
18	Pembangunan Drainase	Drainase Lingkungan	290 m	500,000,000	Program Kota Tanpa Kumuh	2018

19	Pekerjaan Jalan Paving	Jalan	150 m	530.000.000	Program Kota Tanpa Kumuh	2018
		Lingkungan				
20	Pembuatan	Ruang RTH	14 x 12	93.000.000	Program Kota Tanpa Kumuh	2018
	Terbuka Hijau		m			
Penanganan Non Fisik						
1	Biaya Operasional Badan		1	10.000.000	Program Kota Tanpa Kumuh	2018
	Keswadayaan					
	Masyarakat					
2	Pelatihan Masyarakat		1	10.000.000	Program Kota Tanpa Kumuh	2018

Sumber : Data Investasi Kelurahan Takatidung Tahun 2018

Menganalisis pelaksanaan penanganan kumuh di Kawasan Mangeramba sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 dapat disimpulkan model penanganan yang dilakukan adalah Model Peningkatan Kualitas dengan intervensi Pemugaran yaitu dengan melakukan perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni, adapun perbaikan yang dilakukan lebih terfokus kepada peningkatan kualitas jaringan jalan, jaringan drainase dan pengelolaan sampah dan sanitasi. Hal ini dilakukan dengan melihat tingginya persentase kekumuhan di indikator tersebut. Sehingga dengan adanya pelaksanaan fisik tersebut tentunya akan banyak mengurangi luasan kumuh yang ada di kawasan Mangeramba.

F. Analisis Efektifitas Penanganan Kumuh

Analisis efektifitas penanganan kumuh kawasan Mangeramba Kelurahan Takatidung menggunakan metode skoring dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menilai sejauh mana efektifitas penanganan kawasan kumuh di Lingkungan Mangeramba. Adapun indikator yang menjadi penilaian keberhasilan ialah tujuh indikator kumuh yang telah dilaksanakan di kawasan Mangeramba, seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, persampahan, kondisi bangunan, air minum dan proteksi kebakaran. Dengan melihat tabel 21 tentang data investasi kelurahan peneliti coba mengklasifikasi kegiatan tersebut berdasarkan indikator kumuh kemudian melakukan questioner ke responden untuk melihat efektifitas penanganan setelah dan sebelum penanganan.

Tabel 22 Hasil Penanganan Kawasan Kumuh Di Lingkungan Mangeramba

Tahun 2015-2019

No.	KRITERIA/INDIKATOR	PARAMETER	Penanganan	Sisa
A. FISIK				
3.	Kelayakan Bangunan Hunian	Jumlah Bangunan hunian tidak memiliki luas lantai $\geq 7,2$ m ² per orang sebanyak 117 unit Jumlah Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis 117 unit	Rehab 45 Unit	72 Unit
4.	Aksesibilitas Lingkungan	Panjang Total jaringan jalan lingkungan yang ada 1.303.51 m Panjang jalan lingkungan dengan lebar < 1,5 meter : 0 m Panjang jalan lingkungan dengan lebar $\geq 1,5$ meter yang permukaannya tanah : 406.26 m Panjang jalan lingkungan dengan lebar $\geq 1,5$ meter yang permukaannya rusak : 406.26 m Panjang jalan lingkungan dengan lebar $\geq 1,5$ meter yang dilengkapi saluran samping jalan : 406.26 m	Rehab 567 m Rehab 567 m Pembangunan Drainase 290 m	0 m 0 m 116 m
5.	Drainase Lingkungan	Panjang Total drainase : 1.634m Panjang Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas rusak/ tidak berfungsi baik : 327 m	Normalisasi Saluran 520 m	0 m
6.	Pelayanan Air Minum	Jumlah masyarakat yang tidak terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) : 123 RT Jumlah Masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60 liter/org/hari) : 123 RT	Hydran Umum Hydran Umum	0 KK 0 KK

7.	Pengelolaan Air Limbah	Jumlah masyarakat yang tidak memiliki akses jamban keluarga/jamban bersama (5 KK/jamban) : 132 RT	Pembangunal 4 unit IPAL	0 KK
		Jumlah Jamban keluarga/Jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic tank) : 132 RT	Pembangunal 4 unit IPAL	0 KK
8.	Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah domestic rumah tangga di kawasan permukiman yang tidak terangkut ke TPS/TPA minimal dua kali seminggu : 132 RT	2 unit motor sampah	0 kk
9.	Pengamanan Bahaya Kebakaran	Persentase Kawasan permukiman tidak memiliki prasarana/sarana proteksi kebakaran 100%		

Pada variabel pertama indikator jalan lingkungan, yaitu Sebelum pelaksanaan program penanganan kumuh 43 KK responden (71%) menyatakan *Kurang*, Sedangkan setelah pelaksanaan program penanganan kumuh 1 KK responden (7%) menyatakan *kurang*,

Tabel 23 Tabel Tanggapan Responden terhadap indikator Jalan Lingkungan

Variabel	Kondisi Sebelum		Kondisi Sesudah		Keterangan
	%	Kategori	%	Kategori	
jalan lingkungan	71	Kurang	7	Kurang	Berkurang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya program penanganan kumuh terjadi peningkatan kepuasan dalam variabel ketersediaan jalan lingkungan yang tergolong tinggi

Pada variabel kedua indikator drainase lingkungan, yaitu Sebelum pelaksanaan program penanganan kumuh 32 responden (53%) menyatakan *Kurang*, Sedangkan setelah pelaksanaan program penanganan kumuh 9 KK responden (10 %) menyatakan *kurang*,

Tabel 24 Tabel Tanggapan Responden terhadap indikator Drainase Lingkungan

Variabel	Kondisi Sebelum		Kondisi Sesudah		Keterangan
	%	Kategori	%	Kategori	
drainase lingkungan	53	Kurang	15	Kurang	Berkurang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya program penanganan kumuh terjadi peningkatan kepuasan dalam variabel ketersediaan drainase lingkungan yang tergolong tinggi,.

Pada variabel ketiga indikator air minum, yaitu Sebelum pelaksanaan program penanganan kumuh 24 KK responden (40%) menyatakan *Kurang*, Sedangkan setelah pelaksanaan program penanganan kumuh 1 responden (10%) menyatakan *kurang*,

Tabel 25 Tabel Tanggapan Responden terhadap indikator Air minum

Variabel	Kondisi Sebelum		Kondisi Sesudah		Keterangan
	%	Kategori	%	Kategori	
ketersediaan air minum	40	Kurang	10	Kurang	Berkurang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya program penanganan kumuh terjadi peningkatan kepuasan dalam variabel ketersediaan air minum yang tergolong tinggi

Pada variabel keempat indikator pengelolaan sanitasi, yaitu Sebelum pelaksanaan program penanganan kumuh 29 KK responden (47%) menyatakan *Kurang*, Sedangkan setelah pelaksanaan program penanganan kumuh 18 KK responden (30%) menyatakan *kurang*,

Tabel 26 Tabel Tanggapan Responden terhadap indikator Sanitasi

Variabel	Kondisi Sebelum		Kondisi Sesudah		Keterangan
	%	Kategori	%	Kategori	
ketersediaan sanitasi	47	Kurang	30	Kurang	Berkurang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya program penanganan kumuh terjadi peningkatan kepuasan dalam variabel ketersediaan sanitasi yang tergolong tinggi,

Pada variabel kelimat indikator pengelolaan persampahan, yaitu Sebelum pelaksanaan program penanganan kumuh 29 KK responden (49%) menyatakan *Kurang*, Sedangkan setelah pelaksanaan program penanganan kumuh 27 responden (45%) menyatakan *kurang*,

Tabel 27 Tabel Tanggapan Responden terhadap indikator Persampahan

Variabel	Kondisi Sebelum		Kondisi Sesudah		Keterangan
	%	Kategori	%	Kategori	
pengelolaan persampahan	49	Kurang	45	Kurang	Berkurang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya program penanganan kumuh terjadi peningkatan kepuasan dalam variabel ketersediaan pengelolaan persampahan yang tergolong sedang,

Pada variabel keenam indikator kondisi bangunan, yaitu Sebelum pelaksanaan program penanganan kumuh 39 KK responden (65%) menyatakan *Kurang*, Sedangkan setelah pelaksanaan program penanganan kumuh 32 KK responden (53%) menyatakan *kurang*,

Tabel 28 Tabel Tanggapan Responden terhadap indikator Kondisi Bangunan

Variabel	Kondisi Sebelum		Kondisi Sesudah		Keterangan
	%	Kategori	%	Kategori	
Kondisi bangunan	65	Kurang	53	Kurang	Berkurang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya program penanganan kumuh terjadi peningkatan kepuasan dalam variabel Kondisi bangunan yang tergolong sedang

Pada variabel ketujuh indikator proteksi kebakaran, yaitu Sebelum pelaksanaan program penanganan kumuh 61 KK responden (100%) menyatakan *Kurang*, Sedangkan setelah pelaksanaan program penanganan kumuh 61 KK responden (100%) menyatakan *kurang*,

Tabel 29 Tabel Tanggapan Responden terhadap indikator Proteksi Kebakaran

Variabel	Kondisi Sebelum		Kondisi Sesudah		Keterangan
	%	Kategori	%	Kategori	
Proteksi Kebakaran	100	Kurang	100	Kurang	Tetap

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya program penanganan kumuh telah terjadi peningkatan kepuasan dalam variabel ketersediaan proteksi kebakaran yang tergolong tetap, yaitu 100%.

Dari hasil survey responden, didapatkan kesimpulan bahwa enam indikator kumuh di kawasan Mangeramba mengalami penanganan yang cenderung mengurangi aspek penilaian kekumuhan dan juga ditemukan bahwa masyarakat mengalami peningkatan kepuasan sebelum penanganan dan setelah penanganan, adapun enam indikator yang dimaksud adalah indikator jalan lingkungan, drainase lingkungan, air minum, sanitasi, persampahan dan keteraturan bangunan. Dan adapun indikator yang

cenderung belum mengalami perubahan dikarenakan belum adanya intervensi penanganan ialah indikator proteksi kebakaran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari hasil analisis tersebut adalah bahwa.

Pertama, pola penanganan kumuh yang dilakukan di kawasan Mangeramba ialah model penanganan model peningkatan kualitas dengan intervensi pemugaran yaitu dengan melakukan perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni, adapun perbaikan yang dilakukan lebih terfokus kepada peningkatan kualitas jaringan jalan, jaringan drainase dan pengelolaan sampah dan sanitasi.

Kedua, dari analisis efektifitas penanganan kumuh telah terjadi efektifitas penanganan indikator kumuh khususnya diindikator jalan lingkungan, drainase lingkungan, air minum, sanitasi, persampahan, keteraturan bangunan, dan telah berhasil meningkatkan kepuasan responden sebelum dan setelah penanganan kumuh. Dan adapun indikator yang belum mengalami efektifitas penanganan ialah indikator proteksi kebakaran

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran, antara lain sebagai berikut :

1. Penanganan kawasan permukiman kumuh Kawasan Mangeramba dinilai sangat efektif sehingga perlu adanya tindak lanjut pemerintah untuk menyelesaikan sisa aspek kumuh yang belum tertangani seperti Proteksi kebakaran.

2. Perlu adanya kajian lanjutan bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti tentang efektifitas penanganan kumuh, yaitu kajian terkait model penanganan kumuh yang paling efektif yang terdiri dari empat komponen yaitu pengendalian, pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan revitalisasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Aneka Cipta.
- BSPS. 2016. *Panduan Teknis : Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016*
- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka 2017*. Tahun 2017
- Crawford. J.H. 2003. *Composting of Agricultural Waste*. in *Biotechnology Applications and Research*, Paul N., Cheremisinoff and R. P.Ouellette (ed). p. 68-77
- Danim, Sudarwan. (2012). *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta : Rineka.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PUPR, *Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh*, Tahun 2015
- Dunn, William N., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Effendy, Onong Uchjana. 1989. *Kamus Komunikasi*. Mandar Maju. Bandung.
- Erwin, dan Firmansyah. (2016). *Konsep Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Pusat Kota Bandung (Kelurahan Nyengseret)*. Skripsi Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pasundan : Bandung.
- Handayani, Soewarno, 1995. *Azas-Azas Organisasi Manajemen*, CV.Haji Mas Agung, Jakarta
- Heri Sudarsono (2008), *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. Cetakan ke-2
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs, 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Ismawati (2018) *Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto*. Tesis Program Studi Perencanaan wilayah dan kota : Makassar
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung : Refika Aditama
- Nugroho W. (2017). *Penanganan Permukiman Kumuh dengan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana di Pancuran Kota Salatiga*. Tesis Jurnal Ilmu Pemerintahan. Universitas Diponegoro : Semarang

Kurniasih S (2007). *Wajah Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Surabaya*, Tesis Jurnal Planologi.
Universitas Sebelas Maret : Solo

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, No 2 Tahun 2016 *Tentang Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2016*

Program Kota Tanpa Kumuh , *Petunjuk Pelaksanaan Teknik (Juklak)*, Tahun 2016.

Rindrojono (2013). *Penanganan Permukiman Kumuh* . Tesis Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota. Institut Teknologi Bandung : Bandung.

Sedarmayanti, 2006, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Susanto. 2005. *World Class Family Business*. Edisi Pertama. Jakarta Selatan : Quantum Bisnis dan Manajemen

Steers, Richard M. 1998. *Efektivitas Organisasi, Terjemahan*. Jakarta: PPM Erlangga

Tague-Sutcliffe, J. M. (1996). Some perspectives on the evaluation of information retrieval systems. *Journal of the American Society for Information Science*, 47(1), 1–3

Undang – Undang Republik Indonesia No .1 Tahun 2011. *Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*, Departemen Pekerjaan Umum, 2011

Lampiran Dokumentasi Penanganan Kumuh Lingkungan Mangeramba



Pembangunan Rabat Beton Lingkungan Mangeramba



Hydran Umum Ling Mangeramba



Rehab Rumah Tidak layak huni Ling Mangeramba



Pembangunan Jalan Ling Mangeramba



Pembangunan Drainase Ling Mangeramba